



# 6.61%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 22 JUL 2025, 3:48 PM

## Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

**IDENTICAL** 0.01%      **CHANGED TEXT** 6.59%      **QUOTES** 0.28%

## Report #27612971

**23** BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama dari proses pembangunan nasional Indonesia, yang membutuhkan dana pembangunan yang besar bagi pemerintah. Sebagian besar anggaran negara berasal dari pendapatan pajak. Oleh karena itu, pendapatan negara dari bisnis ini dimaksimalkan melalui penerapan berbagai peraturan perpajakan. Pajak adalah kewajiban negara yang harus dibayar oleh individu dan perusahaan. berdasarkan pendapat dari undang-undang yang relevan, pajak-pajak ini bersifat memaksa, dan pembayar pajak tidak langsung mendapatkan keuntungan dari pajak tersebut (UU No. 28/2007). Dari perspektif akuntansi, pajak dipandang sebagai biaya yang berpotensi menurunkan laba bersih bisnis. Tujuan utama dari bisnis adalah untuk memaksimalkan laba, dan kondisi ini bertentangan guna tersebut (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2012). Perusahaan dapat terdorong untuk melakukan strategi pengurangan kewajiban pajak karena perspektif ini, yang menggambarkan pajak sebagai beban dan kewajiban. Satu kesamaan antara perencanaan pajak dan strategi pengurangan kewajiban pajak adalah mengejar penghasilan kena pajak yang lebih rendah atau dihilangkan dengan cara-cara yang sah. Sebaliknya, perencanaan pajak dipandang sebagai strategi pajak yang sah dan dapat diterima, tetapi strategi pengurangan kewajiban pajak sering dianggap tidak etis. Dengan

memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan lain dalam sistem perpajakan, taktik strategi pengurangan kewajiban pajak dimaksudkan guna mengurangi kewajiban pajak sambil tetap mematuhi semua kriteria hukum yang berlaku. Untuk menghindari pembayaran pajak, metode ini biasanya melibatkan transaksi yang sebenarnya tidak memiliki nilai ekonomis. Sebagian besar uang yang diperoleh pemerintah berasal dari pajak. Sangatlah penting bagi setiap orang untuk membayar pajak yang adil agar negara dapat terus berkembang dan makmur. Sebaliknya, bisnis mengalami kesulitan dalam hal pajak, yang dapat mengurangi laba bersih mereka. Oleh karena itu, strategi pengurangan kewajiban pajak baik secara legal maupun ilegal digunakan oleh beberapa perusahaan dalam upaya mencapai keuntungan yang telah ditetapkan (Widnyana et al., 2021). berdasarkan pendapat dari data statistik yang diambil dari Badan Pusat Statistik, sektor pajak adalah sektor yang paling banyak menyumbang pendapatan negara. Realisasi pendapatan negara dari sektor pajak tumbuh dari tahun 2021 hingga 2024, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 karena epidemi COVID-19 (Gambar 1). Pemilik bisnis ingin membayar pajak seminimal mungkin karena sektor pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. berdasarkan pendapat dari Sari dan Marsono (2020), strategi pengurangan kewajiban pajak adalah strategi yang sah bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Istilah "strategi pengurangan kewajiban pajak" menggambarkan salah satu metode yang digunakan individu untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara yang tidak melanggar hukum. Salah satu perusahaan besar di industri tambang, PT Adaro Energy Indonesia, dilaporkan telah mengalirkan sejumlah besar dana ke luar negeri melalui jaringan anak usahanya yang berbasis di berbagai negara. berdasarkan pendapat dari laporan dari organisasi Global Witness (2019), strategi tersebut diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak di dalam negeri. Dalam periode 2009 hingga 2017, negara diperkirakan mengalami potensi

kehilangan penerimaan pajak hingga mencapai USD 125 juta akibat praktik ini. PT Adaro diduga memanfaatkan struktur korporasi lintas negara dengan mendirikan entitas di yurisdiksi yang dikenal sebagai suaka pajak, seperti Labuan (Malaysia), Singapura, dan Mauritius. Transfer pricing adalah metode pengalihan keuntungan antar entitas dalam satu grup perusahaan untuk memanfaatkan celah perbedaan tarif pajak antar negara. Dalam kasus ini, PT Adaro diduga mengalihkan sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari operasinya di Indonesia ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah melalui anak perusahaan mereka. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa otoritas pajak berkomitmen menjalankan pengawasan secara transparan terhadap perusahaan-perusahaan besar, termasuk Adaro. Di sisi lain, para pengamat pajak menekankan bahwa praktik semacam ini seringkali memanfaatkan area abu-abu dalam hukum perpajakan, yang mengindikasikan perlunya regulasi yang lebih tegas guna memastikan keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Strategi pengurangan kewajiban pajak tidak hanya menjadi masalah di industri pertambangan secara umum, tetapi juga spesifik untuk satu perusahaan. Fakta ini saja sudah cukup untuk menyoroti pentingnya penelitian ini. Sejalan dengan tindakan PT Adaro Energy Indonesia, praktik serupa juga ditemukan di PT Kaltim Prima Coal, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Bumi Resources. Anak perusahaan ini ditemukan melakukan transfer pricing yang agresif dengan menjual batu bara kepada perusahaan afiliasinya dengan harga di bawah nilai pasar, guna untuk mengurangi beban pajak. Masalah ini berawal dari fakta bahwa perusahaan-perusahaan dapat secara legal namun tidak etis menurunkan kewajiban pajak mereka karena kelemahan sistem perpajakan berbasis self-assessment. Pelanggaran etika fiskal dan peraturan negara membuat strategi pengurangan kewajiban pajak menjadi bahaya bagi pendapatan negara, bahkan ketika hal itu diperbolehkan secara hukum. Dalam hal ini, tata kelola perusahaan yang baik (GCG)

dianggap sebagai mekanisme kontrol internal yang penting yang dapat mengurangi oportuniste perencanaan pajak oleh manajemen. Ada banyak penelitian yang meneliti seberapa baik komponen-komponen GCG mencegah strategi pengurangan kewajiban pajak. Beberapa komponen ini termasuk kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan institusional. Temuan-temuan yang kontradiktif ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan ilmiah kritis yang membutuhkan lebih banyak penelitian, dan sektor pertambangan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan pajak nasional. Data yang mengindikasikan bahwa industri pertambangan adalah penyumbang pajak terbesar di Indonesia, selain kasus Adaro, semakin memperkuat pentingnya investigasi ini. Sebagaimana dilaporkan oleh DataIndonesia.id (2023) dengan menggunakan data dari Kementerian Keuangan, sektor pertambangan menyumbang 62,9% dari total penerimaan pajak nasional hingga Mei 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor lain seperti transportasi dan pergudangan (46,5%), jasa perusahaan (36,7%), serta jasa keuangan dan asuransi (28,2%). Diproyeksikan bahwa industri pertambangan sendiri menyumbang sekitar Rp521,9 triliun terhadap pendapatan pajak nasional secara keseluruhan pada periode tersebut, dengan asumsi bahwa total pendapatan adalah Rp830 triliun. **39** Pentingnya peran industri pertambangan dalam struktur pendapatan negara ditunjukkan oleh kontribusi yang cukup besar ini. Namun, bahaya yang cukup besar dari taktik strategi pengurangan kewajiban pajak membayangi kontribusi yang besar ini. Kemungkinan yang signifikan untuk metode strategi pengurangan kewajiban pajak ada di industri pertambangan, karena penelitian ini menemukan bahwa sekitar 70% perusahaan di bidang ini memiliki nilai Effective Tax Rate (ETR) di bawah 30%. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan tata kelola perusahaan yang solid untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pelaporan dan kewajiban perpajakan. Informasi lainnya adalah bahwa PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) memiliki nilai Effective Tax Rate (ETR) terendah yaitu 0,19 pada tahun 2023 dari semua tahun

yang diamati antara tahun 2019 dan 2024 dalam hal strategi pengurangan kewajiban pajak. Terdapat bukti kuat adanya taktik strategi pengurangan kewajiban pajak, seperti yang ditunjukkan oleh angka ETR yang rendah ini. Hal ini mencerminkan fenomena yang diteliti, yaitu taktik strategi pengurangan kewajiban pajak pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia, yang selanjutnya mendukung alasan untuk menggunakan PT Adaro Energy Indonesia sebagai sampel pada riset ini. Semua ini mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah alat yang dapat mengendalikan tindakan manajer, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pajak. Salah satu mekanisme tersebut adalah kepemilikan institusional, yang karena pengaruhnya atas pilihan manajemen, dapat mengawasi kebijakan perusahaan. Selain itu, komite audit dan kualitas audit eksternal dianggap dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dan membuat laporan keuangan menjadi lebih transparan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan strategi pengurangan kewajiban pajak. Meskipun demikian, ada juga perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya tentang bagaimana tindakan tata kelola perusahaan memberikan dampak terhadap penggelapan pajak. Salah satu penelitian yang menemukan korelasi positif antara kepemilikan institusional dan penggelapan pajak adalah penelitian Azka Nurmalita Devi dan Rohman (2024). Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) menyatakan bahwa tingkat strategi pengurangan kewajiban pajak cenderung menurun secara signifikan ketika perusahaan memiliki proporsi kepemilikan institusional yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan dari pemilik institusi untuk menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Bukti lebih lanjut bahwa memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh substansial dalam menekan penggelapan pajak berdasarkan pendapat dari Al Bayhagi (2022). Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang kecil terhadap penggelapan pajak,

berdasarkan pendapat dari penelitian Rahmasari Fahria, Ekawati Jati Wibawaningsih, dan Leria Pramesti Nurhidayah (2021). Komite audit tidak memberikan dampak terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak, klaim Abdul Rahman dan Azka Nurmalita Devi (2024). Komite audit memiliki dampak yang besar terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak, berdasarkan pendapat dari penelitian yang dilaksanakan oleh Dzawil al Bayhaqi (2022). Selanjutnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Erna rahmawati dan Ardan gani asalam (2023) mengindikasikan bahwa komite audit memiliki dampak yang besar terhadap penggelapan pajak sekaligus. Iqbal syeh maulana dan mujiyanti (2021) memberikan penelitian yang menunjukkan komite audit dapat menghentikan penggelapan pajak. Terakhir, komite audit berdampak positif terhadap penggelapan pajak, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Yustrida Bernawati dan Utami Nuur Lailatul Idzniah (2020). Aktivitas penggelapan pajak dipengaruhi secara positif oleh audit yang berkualitas tinggi, sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Khoirul garda wijaya (2023). Dan penelitian yang dilaksanakan oleh Leria pramesti nurhidayah, ekawati jati wibawaningsih, dan rahmasari fahria (2021) mengindikasikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian Mira dan A. Wirta Purnamasari (2020) memberikan bukti yang meyakinkan bahwa audit yang berkualitas tinggi secara substansial mengurangi penggelapan pajak. Ketidaksesuaian dalam temuan studi yang disebutkan di atas memicu perdebatan ilmiah, yang pada gilirannya memberikan dasar untuk pertanyaan yang belum terjawab yang membutuhkan studi lebih lanjut. Industri pertambangan memiliki fitur operasi dan peraturan perpajakan yang berbeda, namun secara mengejutkan hanya ada sedikit penelitian tentang topik ini dibandingkan dengan sektor industri dan perbankan. Industri ini sangat penting karena uang pajak yang dihasilkannya cukup besar bagi negara, namun juga sangat rentan terhadap penggelapan pajak. Meskipun akan lebih baik untuk memantau dampak

struktur tata kelola perusahaan terhadap kebijakan pajak dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk menangkap stabilitas dan dinamisme selama bertahun-tahun, banyak penelitian sebelumnya hanya menggunakan metodologi cross-sectional dalam satu kerangka waktu. Dari sudut pandang teori keagenan, sering terjadi ketidakselarasan tujuan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen) dalam hubungan tersebut, terutama dalam hal administrasi kewajiban pajak perusahaan. Untuk memaksimalkan laba setelah pajak, manajemen sering kali melakukan strategi pengurangan kewajiban pajak, yang dapat merugikan pemegang saham jika hal tersebut merusak transparansi dan citra perusahaan (Jensen & Meckling, 1976; Mappadang, 2021). Pada titik ini, kepemilikan institusional dan tindakan pengawasan lainnya menjadi sangat penting. Berdasarkan pendapat dari penelitian Handayani (2018) dan Krisna (2019), pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham yang besar dianggap memiliki kekuatan untuk memberikan dampak terhadap manajemen untuk mengurangi teknik strategi pengurangan kewajiban pajak. Hal ini dikarenakan pemegang saham ini memiliki kepentingan untuk memastikan kredibilitas dan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, berdasarkan pendapat dari teori tata kelola perusahaan, komite audit dan kualitas audit adalah mekanisme pengendalian internal yang diterapkan untuk memastikan manajemen memperhatikan kepentingan semua orang. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan pemeriksaan laporan keuangan dapat dilakukan oleh komite audit yang independen dan kompeten (Dewi & Adhariani, 2020; Haris & Santoso, 2019). Namun, berdasarkan pendapat dari Lestari dan Saputra (2021) dan Suwardi dkk. (2022), kantor akuntan publik (KAP) yang terhormat dianggap dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan mengungkap tanda-tanda strategi pengurangan kewajiban pajak terselubung. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya. Kepemilikan institusional dikaitkan dengan dampak yang menguntungkan

terhadap penggelapan pajak, berdasarkan pendapat dari Azka Nurmala Devi dan Abdul Rohman (2024), sedangkan pengaruh negatif yang cukup besar ditunjukkan oleh Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021). **6** Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak, sementara penelitian lain menunjukkan tidak ada pengaruh apapun.

Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya lebih banyak penelitian yang meneliti bagaimana pengaturan tata kelola perusahaan yang berbeda memberikan dampak terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak, terutama di sektor pertambangan yang rumit dan mahal. Dalam konteks ini, para peneliti berusaha untuk mengatasi kesenjangan dalam literatur dengan meneliti industri pertambangan secara lebih mendalam, menggunakan data panel dalam jangka waktu yang lebih panjang, dan mengatasi kontradiksi dalam temuan penelitian lain. strategi pengurangan kewajiban pajak oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2019 hingga 2024 diteliti dalam kaitannya dengan kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit secara bersamaan. Rumusan Masalah Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance? **14** Bagaimana komite audit memiliki pengaruh terhadap tax avoidance? Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance? Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit secara simultan terhadap tax avoidance? Tujuan

Penelitian Tujuan dari penelitian empiris ini adalah untuk melihat perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2019 hingga 2024 dan melihat bagaimana strategi pengurangan kewajiban pajak berhubungan dengan hal-hal seperti kualitas audit, susunan komite audit, dan kepemilikan institusional. Penelitian ini dimaksudkan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang elemen-elemen yang memberikan dampak terhadap penggelapan pajak di perusahaan pertambangan, khususnya bagaimana kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit. Berikut ini adalah tujuan khusus dari

penelitian ini: Mengetahui bagaimana perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dengan kepemilikan institusional melakukan strategi pengurangan kewajiban pajak. Dalam rangka memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham, penelitian ini dimaksudkan guna mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dengan kemungkinan perusahaan tersebut menggunakan metode strategi pengurangan kewajiban pajak. Menginvestigasi dampak komite audit terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah, dan sejauh mana, komite audit yang berkualitas tinggi yang mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dapat mengurangi kasus strategi pengurangan kewajiban pajak perusahaan. Meneliti perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI untuk mengetahui bagaimana kualitas audit berhubungan dengan strategi pengurangan kewajiban pajak. Penelitian ini dimaksudkan guna mengetahui apakah kualitas audit yang tinggi dapat membantu mengurangi strategi strategi pengurangan kewajiban pajak dengan menjamin bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan status keuangan yang jujur dan transparan. Melihat hubungan antara strategi pengurangan kewajiban pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, komite audit, dan kualitas audit secara bersamaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dampak dari tiga faktor tata kelola perusahaan terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak di industri pertambangan dan untuk menentukan kemampuan proses tata kelola perusahaan yang sangat baik dalam membatasi aktivitas strategi pengurangan kewajiban pajak. 1.4 Manfaat Penelitian Secara khusus relevan dengan industri pertambangan di Indonesia, penelitian ini menambah khazanah pengetahuan secara signifikan dalam beberapa hal baik secara teoritis maupun praktis. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini memberikan penjelasan baru mengenai hubungan antara taktik strategi pengurangan

kewajiban pajak, komite audit, dan kepemilikan institusional. Penelitian ini menambah bukti yang semakin banyak bahwa sistem tata kelola yang baik sangat penting dalam memerangi strategi pengurangan kewajiban pajak dengan memanfaatkan teori keagenan dan teori tata kelola perusahaan. Penelitian di masa depan tentang topik yang sebanding, terutama di industri yang secara signifikan berdampak pada kas negara, akan menemukan kesimpulan penelitian ini sebagai sumber daya yang sangat berharga. Di luar manfaat teoritisnya, penelitian ini memiliki beberapa aplikasi praktis. Dalam artikel ini, kami akan mengulas poin-poin penting dari tata kelola perusahaan yang baik dan bagaimana hal tersebut memberikan dampak terhadap manajemen perusahaan. Kita akan melihat bagaimana membuat komite audit lebih efektif dan bagaimana memasukkan kepemilikan institusional dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya temuan studi ini, perusahaan mungkin akan merasa tertekan untuk mengadopsi prosedur audit yang lebih terbuka dan bertanggung jawab untuk mengurangi kemungkinan strategi pengurangan kewajiban pajak. Selain itu, perusahaan juga dapat belajar betapa pentingnya mempekerjakan auditor yang dapat diandalkan, yang membantu menjaga kejujuran laporan keuangan dan menjamin bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini memberikan informasi yang berharga bagi para regulator dan pembuat kebijakan dengan menunjukkan bagaimana elemen-elemen tata kelola perusahaan yang berbeda memberikan dampak terhadap kepatuhan pajak. Dengan menggunakan data ini, perusahaan-perusahaan, terutama di sektor pertambangan, yang memiliki tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, dapat terdorong untuk menerapkan praktik-praktik manajemen pajak yang bertanggung jawab. Selain itu, pihak berwenang dapat menggunakan penelitian ini untuk menentukan area mana, seperti aktivitas komite audit atau kualitas auditor eksternal, yang membutuhkan pengawasan lebih lanjut. Yang juga berpotensi terbantu adalah para akademisi dan peneliti.

Untuk mengeksplorasi lebih jauh hubungan antara tata kelola perusahaan dan strategi pengurangan kewajiban pajak, penelitian di masa depan dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti hubungan tersebut dengan menggunakan faktor atau sektor lain. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana faktor-faktor seperti ukuran dan keahlian komite audit berdampak pada efektivitas pengawasan pajak, misalnya, diperlukan lebih banyak penelitian. Terakhir, masyarakat luas juga terpengaruh oleh penelitian ini. Penelitian ini membantu meningkatkan pendapatan negara secara tidak langsung dengan mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih terbuka dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Jika kita ingin membantu negara tumbuh dan masyarakat hidup lebih baik, hal ini adalah suatu keharusan. Penelitian ini dimaksudkan guna membangun kepercayaan publik terhadap sektor bisnis di Indonesia dengan menarik perhatian pada teknik strategi pengurangan kewajiban pajak, yang pada akhirnya menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan operasinya. 50 52 BAB II TINJAUAN

PUSTAKA 2.1. 50 Landasan Teori 2.1 1 Teori Agen (Agency Theory)

Jadi, berdasarkan pendapat dari teori keagenan, manajer dapat mengambil manfaat dari kepemilikan institusional sebagai pengawas, terutama dalam hal menghindari strategi strategi pengurangan kewajiban pajak yang merugikan laba pemilik dalam jangka panjang, karena dapat menjelaskan dan secara teoritis mendukung berbagai tindakan manajerial, teori keagenan banyak digunakan. Dalam konteks taktik strategi pengurangan kewajiban pajak, Mappadang (2021) menekankan relevansi teori ini untuk menjelaskan dinamika interaksi antara pihak manajemen dan pemegang saham. 5 21 Teori yang menjelaskan hubungan antara manajer perusahaan yang berwenang (agen) dengan pemilik modal (prinsipal) adalah teori keagenan, berdasarkan pendapat dari Jensen dan Meckling (1976). Ketika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang saling melengkapi, agen lebih cenderung melakukan pekerjaannya dengan cara yang memajukan agenda prinsipal. Namun pada kenyataannya,

kepentingan kedua belah pihak sering kali bertentangan satu sama lain. Karena ketidakseimbangan ini, dua masalah utama mungkin timbul dalam hubungan: pertama, ketidakseimbangan pengetahuan (asimetri informasi) dan kedua, kemungkinan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Manajer, dalam kapasitasnya sebagai agen, memiliki lebih banyak akses ke cara kerja perusahaan dan prospek masa depannya daripada pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan, yang mengarah pada asimetri informasi (Handayani, 2018). Kepemilikan institusional, misalnya, memiliki insentif untuk mengurangi aktivitas strategi pengurangan kewajiban pajak yang berisiko tinggi untuk menjaga transparansi dan reputasi perusahaan di kalangan investor. Hal ini menyoroti perlunya kontrak kerja yang efisien dan efektif untuk mengurangi informasi yang tersembunyi dan menjaga agar informasi tetap mengalir antara agen, prinsipal, dan pihak-pihak terkait lainnya. Konflik kepentingan antara pemilik organisasi, atau prinsipal, dan manajer, atau agen, melekat pada semua struktur perusahaan modern, berdasarkan pendapat dari teori keagenan. Manajer perusahaan dapat mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan pemilik, terutama dalam hal pajak. Salah satu bentuk perilaku oportunistik adalah strategi pengurangan kewajiban pajak, yaitu menghindari pajak dengan memanfaatkan celah hukum. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam situasi ini dengan menyediakan sarana pengawasan atas tindakan manajerial. Dana pensiun, reksadana, dan investor institusional lainnya sering kali memiliki sumber daya, fokus pada jangka panjang, dan pengetahuan untuk menekan manajemen agar memprioritaskan kepentingan kolektif pemegang saham. Sejumlah penelitian telah mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan berdampak pada pengurangan taktik strategi pengurangan kewajiban pajak. Mengulangi temuan Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021), kecil kemungkinan sebuah perusahaan sengaja menghindari pembayaran pajak ketika proporsi sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi. Temuan

Krisna (2019) dan Astuti dkk. (2020) menguatkan temuan ini; kedua studi tersebut menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan fiskal bagi investor institusional dalam memastikan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dan persepsi publik yang positif. Lemahnya kontrol atas aktivitas manajemen dapat disebabkan oleh kepemilikan individu yang mendominasi bisnis atau tidak adanya kepemilikan institusional. Meskipun demikian, tidak semua studi menemukan korelasi terbalik. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak, berdasarkan pendapat dari Azka Nurmalia Devi dan Abdul Rohman (2024). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua pemilik institusional aktif dalam mempromosikan kepatuhan pajak; pada kenyataannya, beberapa dari mereka dengan sengaja berpartisipasi dalam atau bahkan mendukung taktik strategi pengurangan kewajiban pajak untuk memaksimalkan keuntungan investasi jangka pendek mereka. Dengan demikian, jenis institusi, tujuan investasi, dan tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan sangat memberikan dampak terhadap keefektifan kepemilikan institusional dalam mengurangi strategi pengurangan kewajiban pajak.

### 2.1.2 Teori Corporate Governance

Tetapi penelitian lain, seperti yang dilaksanakan oleh Erna Rahmawati dan Ardan Gani Asalam (2023) dan Iqbal Syeh Maulana dan Mujiyati (2021), mengindikasikan bahwa komite audit menghalangi strategi pengurangan kewajiban pajak, memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa komite audit yang berfungsi dengan baik dapat mengurangi kecenderungan manajemen untuk melakukan strategi pengurangan kewajiban pajak. Sebaliknya, kualitas audit adalah komponen kunci dari tata kelola perusahaan yang baik. Kualitas audit ditentukan oleh seberapa baik dan tidak memihaknya auditor luar dalam mengevaluasi laporan keuangan perusahaan, termasuk kebijakannya. Sering diasumsikan bahwa auditor dari perusahaan akuntan publik (KAP) terkemuka, termasuk KAP Big Four, lebih siap untuk mengidentifikasi contoh-contoh strategi pengurangan kewajiban pajak. Baik studi oleh

Sri Mulyani dkk. (2018) maupun studi oleh Mira dan A. Wirta Purnamasari (2020) mendukung gagasan bahwa perusahaan dapat didorong untuk lebih patuh terhadap persyaratan pajak mereka dengan memiliki auditor berkualitas tinggi. Tata kelola perusahaan, berdasarkan pendapat dari Shleiver dan Vishny (1997), adalah serangkaian tindakan yang, melalui penggunaan proses hukum, dapat mencegah para manajer dan pemilik pengendali untuk mencuri dari investor luar dan pemegang saham minoritas. Sistem dan prosedur internal perusahaan yang menjamin manajemen memperhatikan kepentingan pemegang saham adalah penekanan utama teori tata kelola perusahaan. Komite audit adalah bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik karena tanggung jawabnya untuk memantau prosedur pelaporan keuangan dan taktik strategi pengurangan kewajiban pajak. Audit yang lebih menyeluruh dan evaluasi risiko yang lebih akurat dapat dihasilkan oleh komite audit yang efektif, yang, jika gagasan ini benar, dapat membantu memerangi penggelapan pajak. Penelitian Dewi dan Adhariani (2020) sebelumnya mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit yang independen dan kompeten mengurangi kemungkinan strategi pengurangan kewajiban pajak oleh perusahaan- perusahaan di Indonesia. Effective tax rate (ETR) perusahaan, yang adalah ukuran potensi strategi pengurangan kewajiban pajak, berbanding terbalik dengan frekuensi dan kedalaman rapat komite audit (Haris dan Santoso, 2019). Hal ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa komite audit dapat meningkatkan pengawasan mereka terhadap pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap aturan pajak lainnya ketika mereka menyertakan anggota independen dengan keterampilan akuntansi yang memadai. Hal ini berarti komite audit yang berfungsi dengan baik berhubungan dengan berkurangnya strategi pengurangan kewajiban pajak. Kualitas audit eksternal sama pentingnya dengan komite audit dalam hal menghindari pajak. Auditor eksternal yang memiliki reputasi baik, seperti yang bekerja untuk kantor akuntan publik (KAP) besar, lebih

mungkin untuk mengawasi laporan keuangan perusahaan dan memastikan bahwa mereka taat pajak. Lestari dan Saputra (2021) menemukan bahwa di antara perusahaan yang terdaftar di BEI, kualitas audit yang sangat baik berbanding terbalik dengan teknik strategi pengurangan kewajiban pajak. Metode pelaporan keuangan yang tidak tepat, seperti penggelapan pajak, sering kali dapat dideteksi oleh auditor yang kompeten karena pengetahuan mereka yang luas di bidangnya. Kontrol yang lebih baik terhadap strategi strategi pengurangan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan adanya komite audit yang berkualitas dan audit eksternal yang berkualitas tinggi. Tata kelola perusahaan mungkin akan lebih berhasil dalam menghindari strategi pengurangan kewajiban pajak jika kedua elemen ini bekerja sama, berdasarkan pendapat dari penelitian Suwardi dkk. (2022). Dalam konteks Indonesia, di mana peraturan pajak. berdasarkan pendapat dari para pendukung gagasan tata kelola perusahaan, sistem pengendalian internal perusahaan, termasuk keberadaan komite audit dan ketelitian audit eksternal, sama pentingnya dengan jumlah pemegang saham yang memegang saham. Integritas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan kemampuan sistem pengendalian internal, termasuk prosedur perpajakan, adalah tanggung jawab yang signifikan dari komite audit. Dengan memeriksa kebijakan pajak perusahaan dan mengawasi pelaporan keuangan yang mungkin menyembunyikan beban pajak, komite audit yang independen dan kompeten, yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dewan komisaris, dapat menekan teknik strategi pengurangan kewajiban pajak. Kemampuan komite audit untuk mencegah strategi pengurangan kewajiban pajak telah menjadi subyek dari berbagai temuan yang saling bertentangan di masa lalu. Misalnya, Diah Retna Sumekar dkk. (2023) menemukan bahwa komite audit secara signifikan membantu penggelapan pajak, yang mengindikasikan bahwa manajemen diberi lebih banyak kelonggaran untuk mengeksploitasi kesenjangan dalam undang-undang perpajakan karena struktur komite audit yang kurang ideal. Tampaknya

reputasi auditor tidak selalu diterjemahkan ke dalam keefektifan dalam mengidentifikasi manipulasi pajak, melainkan tergantung pada kualitas pengawasan internal klien, seperti yang ditemukan oleh Leria Pramesti Nurhidayah dkk. (2021) yang menemukan bahwa kualitas audit tidak berdampak pada strategi pengurangan kewajiban pajak. Secara teoritis, kualitas audit yang baik dan komite audit yang terlibat dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa skema strategi pengurangan kewajiban pajak diawasi secara memadai. Kedua alat ini, jika digunakan bersama-sama, dapat membuat keuangan perusahaan lebih terbuka dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi strategi pengurangan kewajiban pajak.

### 2.1.3 Kepemilikan Institusional

Ketika organisasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi mengendalikan sebagian saham perusahaan, kami mengatakan bahwa mereka adalah pemilik institusional. Kepemilikan institusional dapat memberikan kontrol terhadap manajemen melalui monitoring yang efektif, yang pada akhirnya mengurangi aktivitas manajemen laba (Larasati & Srimindarti, 2021). Ketika membahas tata kelola perusahaan, gagasan bahwa kepemilikan institusional dapat memberikan lebih banyak tekanan pada manajemen daripada kepemilikan individu sering dikemukakan. Kapasitas untuk melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan dan akses informasi yang lebih baik menjadi alasan utama. Kepemilikan institusional juga telah menjadi subjek dari banyak penelitian di Indonesia. Sebagai contoh, Rahmawati dan Handayani (2020) mengindikasikan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional, kemungkinan manipulasi laporan keuangan dapat dikurangi. Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa institusi tidak hanya menganalisis elemen keuangan, tetapi juga isu-isu non-keuangan seperti tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Dampak kepemilikan institusional dirasakan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai industri, tidak hanya di industri tertentu. Sebagai ilustrasi, kita ambil contoh sektor manufaktur. berdasarkan pendapat

dari penelitian Widyaningrum dan Wahyudi (2019), institusi yang memiliki saham di perusahaan berkontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan sumber daya. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bagaimana institusi dapat memberikan tekanan pada manajemen untuk mematuhi standar tata kelola yang baik. 2.1

1 29 48 49 4 Komite Audit Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.

29 48 55/POJK 3 6 46 04/2015, komite audit dibentuk, diangkat, dan

diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Kelompok ini terdiri dari

minimal tiga anggota: satu komisaris yang tidak memihak yang juga

menjabat sebagai ketua komite audit dan dua anggota tambahan yang

dicalonkan oleh pihak eksternal. 28 Untuk membantu dewan komisaris dalam

mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab manajemen yang

adil dan kompeten oleh direksi perusahaan publik, komite audit dibentuk. Selain

itu, komite audit juga harus mengawasi setiap indikasi kesalahan

atau konflik kepentingan di tempat kerja. Komite ini bertanggung

jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan dibuat dan disajikan

sesuai dengan semua peraturan dan kaidah akuntansi yang berlaku.

Seseorang dapat mengevaluasi keberadaan dan keefektifan komite audit

dengan membaca informasi yang diberikan dalam profil komite audit

yang disertakan dalam laporan tahunan perusahaan. Secara umum, komite

audit bertanggung jawab untuk mencegah manipulasi orang dalam,

menangani konflik kepentingan, dan memastikan bisnis mengikuti semua

peraturan dan regulasi serta bekerja secara etis. Dalam artikelnya

yang berjudul Komite Audit, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan dan

strategi pengurangan kewajiban pajak: Studi Empiris di Indonesia,

Rahmawati Yustrianthe (2022) menemukan bahwa strategi strategi

pengurangan kewajiban pajak perusahaan dipengaruhi oleh keberadaan

komite audit. 2.1.5 Kualitas Audit berdasarkan pendapat dari Krisna

(2019), kualitas audit terjadi ketika seorang auditor menemukan

kelemahan yang disengaja dalam laporan keuangan atau sistem akuntansi

klien ketika melakukan tanggung jawabnya dan melaporkan temuan ini

kepada manajemen. Selain itu, Herawaty dan Susanto (2019) menemukan bahwa pengalaman auditor dan pelatihan profesional berkorelasi kuat dengan kualitas audit dalam audit di Indonesia. **32 Auditor yang lebih berpengalaman lebih mungkin untuk menemukan kesalahan dalam laporan keuangan, terutama yang melibatkan strategi manajemen laba.** Kapasitas auditor untuk memahami modifikasi peraturan dan regulasi akuntansi juga dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang berkelanjutan. Tekanan waktu memberikan dampak terhadap kualitas audit, berdasarkan pendapat dari penelitian lain oleh Rahayu dan Sari (2020). Karena ketidakmampuan auditor untuk mencurahkan waktu yang cukup untuk meninjau laporan keuangan klien secara menyeluruh, mereka menemukan bahwa tekanan waktu yang berlebihan dapat menurunkan kualitas audit. Jadi, untuk menjaga kualitas audit tetap tinggi, mereka merekomendasikan agar KAP memberikan waktu yang cukup untuk setiap pekerjaan. Kontrol kualitas internal KAP adalah komponen penting lainnya dari audit berkualitas tinggi. Pengendalian mutu internal yang baik dapat membantu auditor menjaga independensi dan profesionalisme mereka selama audit, kata Arya dan Nugraheni (2021). Sebelum menerbitkan laporan audit, pekerjaan auditor dievaluasi, dan daftar periksa standar digunakan sebagai bagian dari kontrol kualitas ini.

### 2.1.6 Tax Avoidance

(strategi pengurangan kewajiban pajak) strategi pengurangan kewajiban pajak, di mana orang mengambil tindakan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, mengurangi jumlah uang yang diperoleh negara sebagai hasilnya. Wajib pajak dapat mengambil tindakan ini untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak mereka tanpa melanggar hukum apa pun. strategi pengurangan kewajiban pajak mengacu pada praktik meminimalkan tanggung jawab pajak secara legal dengan cara menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar, misalnya dengan memanfaatkan celah atau pengecualian dalam peraturan perpajakan yang relevan (Pasaribu dan Mulyani, 2019). Terdapat kerangka hukum yang memperbolehkan wajib pajak melakukan strategi pengurangan kewajiban pajak untuk menghindari

tanggung jawab pajak mereka. Namun, tindakan ini dapat merusak citra perusahaan, terutama di mata masyarakat. berdasarkan pendapat dari Jamaludin (2020), strategi pengurangan kewajiban pajak adalah masalah yang rumit dan menarik karena, meskipun tidak secara langsung melanggar hukum, namun hal ini juga tidak sesuai dengan harapan pemerintah yang mengharapkan wajib pajak untuk patuh sepenuhnya.

### 2.2. Penelitian Terdahulu

### 2.3. Perbedaan Dengan Penelitian Saat Ini

Jika dibandingkan dengan penelitian lain, penelitian ini menonjol karena beberapa alasan utama. Variabel yang diterapkan dalam kajian ini antara lain kualitas audit, komposisi komite audit, dan kepemilikan institusional. Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) menggunakan variabel komisaris independen dalam penelitian sebelumnya. Saat ini, penelitian ini tidak melibatkan pihak penengah yang netral. Penelitian ini terbatas pada perusahaan terkait pertambangan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2019-2024. Berbeda dengan penelitian kualitatif Rananda Septanta (2023) tentang strategi pengurangan kewajiban pajak, penelitian ini menggunakan data numerik yang diekstrak dari dokumen keuangan perusahaan untuk melakukan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini mempertimbangkan kualitas audit sebagai variabel independen untuk menilai pengaruhnya terhadap penggelapan pajak, meskipun penelitian sebelumnya oleh Leria Pramesti Nurhidayah dkk. (2021) gagal menemukan korelasi yang substansial di antara keduanya. Penelitian sebelumnya oleh Sri Mulyani, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh (2018) melihat penggelapan pajak dari sudut pandang jumlah penurunan laba bersih, sedangkan penelitian saat ini menggunakan nilai ETR. Berbeda dengan penelitian Taufik Hidayat (2021) yang berusaha menganalisis berbagai sektor industri di seluruh dunia, penelitian ini berfokus pada industri pertambangan di Indonesia dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2019 hingga 2024.

### 2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam Penelitian ini, peneliti merancang sebuah kerangka konsep yang

melibatkan sejumlah variabel untuk diuji pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan. Variabel-variabel tersebut mencakup Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit dan Tax Avoidance. 2.5 Hipotesa mengacu pada variabel pada penelitian diatas, adapun hipotesis yang digunakan yaitu : 2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance berdasarkan pendapat dari Krisna (2019), kepemilikan institusional berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan suatu perusahaan, serta dalam memonitoring operasional perusahaan dan memberikan lampu hijau kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan terkait keuangan perusahaan. berdasarkan pendapat dari penelitian yang dilaksanakan oleh Leria Pramesti Nurhidayah pada tahun 2021, penggelapan pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Begitu pula dengan Rananda Septanta (2023) yang menemukan hal yang sama dalam penelitiannya. Kepemilikan institusional mengurangi penggelapan pajak, berdasarkan pendapat dari penelitian Azka Nurmala Devi dan Abdul Rohman (2024). H1 : Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance 2.5.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Integritas dan transparansi laporan keuangan perusahaan bergantung pada kerja komite audit. Dengan tanggung jawab pengawasannya, komite audit berharap untuk melihat lebih sedikit contoh penggelapan pajak. Pengaruh komite audit terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak telah menjadi subyek dari berbagai penelitian yang saling bertentangan. 2 Misalnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari komite audit terhadap penggelapan pajak. Temuan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak di sektor pertambangan, berdasarkan pendapat dari penelitian yang dilaksanakan oleh Azka Nurmala Devi dan Abdul Rohman (2024). berdasarkan pendapat dari penelitian Badewin (2019) komite audit tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. H2 : Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax

Avoidance 2.5.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Banyak orang berpikir bahwa audit yang baik sangat penting untuk menjaga bisnis pada standar transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap para pemangku kepentingan. Auditor yang terampil dapat menemukan dan menghentikan strategi pengurangan kewajiban pajak dan bentuk-bentuk manipulasi keuangan lainnya. Kualitas audit tidak terkait dengan penggelapan pajak, berdasarkan pendapat dari studi Leria dari tahun 2021. Tidak adanya korelasi antara kualitas audit dan strategi pengurangan kewajiban pajak ditemukan oleh Leria Pramesti Nurhidayah dkk. (2021), yang mengindikasikan bahwa memiliki auditor yang kompeten tidak secara otomatis menghalangi strategi pengurangan kewajiban pajak. Selain itu, Azka Nurmala Devi dan Abdul Rohman (2024) tidak menemukan adanya korelasi antara strategi pengurangan kewajiban pajak dengan kualitas audit di industri pertambangan. H3 : Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance 2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (H4) Demikian pula, meskipun pada tingkat yang berbeda-beda, Diah Retna Sumekar, Sri Mulyani, dan Siti Nuridah (2023) menemukan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional memberikan dampak terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak. Hasil-temuan studi sebelumnya bertentangan dengan hal ini. Dengan kata lain, dampak terhadap penggelapan pajak dilemahkan oleh kombinasi faktor-faktor yang saling berinteraksi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran tata kelola perusahaan dalam kerangka pengawasan pajak, sangat penting untuk menguji ketiga faktor tersebut secara simultan, prosedur pengawasan internal dan eksternal sangat penting dalam mencegah teknik strategi pengurangan kewajiban pajak dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik. Kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit adalah tiga komponen kunci dari pengawasan semacam ini yang dapat

memberikan dampak terhadap keputusan manajemen dalam menerapkan strategi pajak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai strategi pengurangan kewajiban pajak, kita perlu melihat bagaimana ketiga faktor tersebut berinteraksi satu sama lain. Di sini, teori-teori keagenan dan tata kelola perusahaan memberikan dasar yang kuat untuk menyelidiki hubungan antara faktor-faktor ini. Salah satu potensi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer muncul dari fakta bahwa manajemen sering memprioritaskan keuntungan jangka pendek di atas tujuan jangka panjang, seperti menaikkan kompensasi mereka atau menurunkan kewajiban pajak mereka. Hal ini sejalan dengan teori keagenan. Konflik kepentingan ini, bagaimanapun, dapat dimitigasi ketika perusahaan dikelola dengan baik, dengan fitur-fitur seperti pemegang saham institusional, komite audit yang efisien, dan auditor eksternal yang kompeten. Ketiga faktor ini memberikan checks and balances terhadap perilaku oportunistik manajemen, seperti dalam hal persiapan dan pelaporan pajak. Kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit memiliki peran utama dalam strategi pengurangan kewajiban pajak, berdasarkan pendapat dari penelitian sebelumnya. Ketiga faktor tersebut bekerja sama untuk mencegah strategi pengurangan kewajiban pajak, berdasarkan pendapat dari Rasyid, Wiralestari, dan Friyani (2023) dari *Jambi Accounting Review*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel terhadap kewajiban pajak mereka ketika kerangka pengawasan yang baik tersedia. Meskipun hanya komite audit yang memiliki pengaruh signifikan, studi Dzawil Al Bayhaqi (2022) mengindikasikan bahwa sistem tata kelola perusahaan secara keseluruhan memiliki dampak yang besar terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak. Hal ini menambah bobot pada klaim bahwa kerangka kerja yang komprehensif diperlukan untuk memahami interaksi komponen-komponen tata kelola perusahaan. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Badewin (2019), terdapat hubungan

langsung antara transparansi pajak dan integritas laporan keuangan, yang dipengaruhi oleh kualitas audit dan kepemilikan institusional. Secara tidak langsung, penelitian ini membantu kita memahami bagaimana prosedur pengawasan internal dan eksternal dapat menekan metode strategi pengurangan kewajiban pajak, meskipun penekanan utamanya adalah pada integritas laporan keuangan. Keandalan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan adalah pertanda baik dari seberapa baik perusahaan menangani informasi keuangan dan pajak. Namun demikian, penelitian telah mengindikasikan bahwa ketiga faktor tersebut tidak selalu memiliki dampak yang konsisten terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak jika dipertimbangkan secara bersama-sama. Sebagai contoh, Rananda Septanta (2023) menemukan bahwa beberapa faktor sistem tata kelola perusahaan secara signifikan berdampak pada penggelapan pajak, sementara yang lain tidak. Temuan dari penelitian ini menyoroti pentingnya faktor spesifik perusahaan termasuk industri, ukuran, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam menentukan efektivitas proses tata kelola perusahaan. H4 : Pengaruh Secara Simultan Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. 8 15 17 24 29 44

### BAB III METODE PENELITIAN 3.1

Jenis Penelitian Metode kuantitatif diterapkan dalam kajian ini. Salah satu paradigma penelitian positivis adalah pendekatan kuantitatif, yang menggunakan data numerik dari populasi atau sampel tertentu untuk mengevaluasi hipotesis. Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dan dapat dicek kembali, data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat. Metode kuantitatif deskriptif diterapkan dalam kajian ini.

1 Untuk menguji hipotesis, teknik kuantitatif menggunakan data dari sampel yang representatif dari populasi; pendekatan deskriptif, di sisi lain, berusaha menjelaskan atau mengkarakterisasi fenomena yang diteliti tanpa menarik generalisasi yang luas. Di sini, kami mempelajari strategi pengurangan kewajiban pajak sebagai variabel dependen dan mencari pola korelasi antara strategi pengurangan

kewajiban pajak dan faktor-faktor independen termasuk kepemilikan institusional, keberadaan komite audit, dan kualitas audit. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang terdaftar di BEI (BEI) sebagai lokasi penelitian. Pemilihan BEI sebagai lokasi penelitian didasarkan pada perannya sebagai pasar modal utama di Indonesia yang menjadi tempat perdagangan saham perusahaan publik. Selain itu, BEI menyediakan data keuangan yang lengkap, sistematis, dan mudah diakses melalui situs resminya, sehingga memudahkan proses pengumpulan data yang dibutuhkan pada riset ini.

### 3.2 Objek Penelitian Perusahaan yang terdaftar di BEI (BEI) dalam industri pertambangan dari tahun 2019 hingga 2024 menjadi fokus penelitian ini.

Intensitas modal yang tinggi, kompleksitas operasional, dan isu lingkungan yang cukup besar adalah beberapa ciri khas yang mendasari pemilihan industri pertambangan. Kontribusi pajak industri ini kepada negara cukup besar, sehingga studi tentang strategi pengurangan kewajiban pajak menjadi semakin relevan. Aturan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan keterbukaan dan akuntabilitas pelaporan keuangan, cenderung membuat perusahaan-perusahaan di industri ini menjadi pusat perhatian. Penelitian ini melihat kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit sebagai tiga variabel terpisah yang dapat memberikan dampak terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak. Pencegahan strategi pengurangan kewajiban pajak dan kepatuhan manajemen terhadap kepentingan pemegang saham adalah tujuan utama dari kepemilikan institusional. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak (Herawaty, 2020) menemukan bahwa ketika terdapat banyak kepemilikan institusional, taktik strategi pengurangan kewajiban pajak cenderung lebih jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan para investor ini memiliki insentif yang kuat untuk menjaga reputasi perusahaan. Karena bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan pelaporan keuangan, komite audit juga mendapat sorotan.

Darmawan dan Sukartha (2019) "Pengaruh Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, dan Leverage terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak menemukan bahwa perusahaan dengan komite audit yang kuat lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan pelanggaran pajak karena laporan keuangan mereka diaudit secara menyeluruh dan sesuai dengan standar. Terakhir, kualitas audit adalah variabel independen yang penting untuk dipertimbangkan di sini. Jaminan bahwa laporan keuangan perusahaan, termasuk pelaporan pajak, bebas dari kesalahan besar dapat diberikan oleh auditor eksternal yang berkualitas tinggi. "Pengaruh Kualitas Audit, Profitabilitas, dan Struktur Modal terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak (Prabitta dan Supriyadi, 2021) mengungkapkan bahwa kualitas audit menghambat strategi pengurangan kewajiban pajak. Kemungkinan strategi pengurangan kewajiban pajak berbanding terbalik dengan kualitas audit, yaitu kualitas audit yang lebih besar mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung tidak melakukan strategi pengurangan kewajiban pajak. Dampak potensial dari strategi pengurangan kewajiban pajak terhadap keuangan nasional dan citra perusahaan membuatnya menjadi variabel dependen yang mengganggu. Perusahaan-perusahaan dalam bisnis pertambangan mungkin terlibat dalam metode strategi pengurangan kewajiban pajak karena tekanan yang kuat untuk meningkatkan pendapatan bagi pemegang saham. Namun, dengan adanya tata kelola perusahaan yang kuat, seperti kepemilikan institusional, komite audit yang efisien, dan auditor yang kompeten, tekanan semacam ini dapat dikurangi seminimal mungkin. Temuan dari penelitian ini memperluas pemahaman kita mengenai faktor-faktor yang memberikan dampak terhadap taktik strategi pengurangan kewajiban pajak yang digunakan oleh sektor pertambangan, baik secara keseluruhan maupun oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dari tahun 2019 hingga 2024, penelitian ini akan meneliti data dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI di sektor ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit terhadap

strategi pengurangan kewajiban pajak. Untuk menunjukkan hubungan antara faktor-faktor ini, metode kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data dari laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan. 3.3 Populasi dan Sampel Dari tahun 2019 hingga 2024, 83 perusahaan dari sektor pertambangan industri ekstraktif yang terdaftar di BEI menjadi populasi pada riset ini. 10 13 18 24 43 Untuk memilih sampel, metode purposive sampling mempertimbangkan faktor dan kriteria tertentu. Berikut adalah kriteria sampel penelitian: Selama enam tahun, tiga puluh perusahaan yang berbeda diperiksa, yang semuanya dipilih dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasilnya, 180 sampel digunakan untuk mengumpulkan data untuk investigasi ini. Perusahaan-perusahaan yang menjadi fokus investigasi ini tercantum di bawah ini. 3.4 Teknik Pengumpulan Data Sumber data primer yang diterapkan dalam kajian ini adalah laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan E-Views 13, sebuah program untuk pengolahan data. Sebagai langkah awal, kami mengumpulkan data sekunder dengan membaca laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2019 hingga 2024. Mengikuti serangkaian kriteria yang telah ditentukan, penelitian ini memilih sampel tiga puluh perusahaan dari BEI yang telah merilis laporan keuangan yang telah diaudit dalam laporan tahunannya. Hanya perusahaan yang memiliki data mengenai komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan taktik strategi pengurangan kewajiban pajak yang terindikasi ETR yang akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam sampel. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan purposif untuk mengumpulkan data dari 180 set data perusahaan yang berbeda. Perangkat lunak statistik EViews 13 (Econometric Views) digunakan untuk memproses data setelah dikumpulkan. Kami menggunakan EViews 13 untuk menganalisis data dan melihat apakah hipotesis penelitian kami terbukti. Kami menggunakan uji seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan analisis regresi untuk mengetahui bagaimana hal-hal seperti komposisi komite

audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional memberikan dampak terhadap pendekatan strategi pengurangan kewajiban pajak yang ditunjukkan oleh indikator ETR. Selain itu, kami akan memverifikasi keakuratan dan kelengkapan data laporan keuangan yang diperoleh dari BEI dengan melakukan pengecekan ulang. **16 47** Kami langsung mengunjungi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), situs web BEI, untuk mendapatkan data laporan keuangan. Data tersebut meliputi data historis dan laporan tahunan semua perusahaan yang terdaftar. Dampak tata kelola perusahaan terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak di Indonesia telah diteliti dalam banyak penelitian (Darmawan, S., & Rini, D., 2020). Para peneliti di Indonesia menemukan bahwa variabel ini secara signifikan memberikan dampak terhadap strategi strategi pengurangan kewajiban pajak. Dengan menggunakan data dari laporan tahunan 2015-2019 perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI, penelitian ini menggunakan Eviews 13 untuk melihat hubungan antara komite audit, kepemilikan institusional, dan taktik strategi pengurangan kewajiban pajak. Kualitas audit dan kepemilikan institusional adalah faktor yang memberikan dampak terhadap strategi strategi pengurangan kewajiban pajak, berdasarkan pendapat dari penelitian mereka. Penelitian "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak pada Perusahaan Sektor Energi oleh Yuliana, N., & Hariyanto, T. (2021) meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan dan strategi pengurangan kewajiban pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI dari tahun 2016 hingga 2020 dengan menggunakan metodologi yang mirip dengan analisis Eviews. Kedua penelitian ini memberikan gambaran tentang metode dan proses yang terlibat dalam bidang studi ini. Penelitian ini berusaha untuk mempelajari faktor-faktor yang memberikan dampak terhadap strategi strategi pengurangan kewajiban pajak yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di industri pertambangan Indonesia. Proyek ini akan menggunakan EViews untuk memproses data yang diekstrak dari catatan keuangan

yang tersedia di BEI. Hasil yang dapat dipercaya dan otentik akan dihasilkan. 3.5 Variabel Penelitian 3.5 **20** 1. Variabel Independen (X)

Variabel X1: Kepemilikan Institusional Organisasi seperti dana pensiun, perusahaan investasi, bank, dan perusahaan asuransi memiliki proporsi tertentu dari saham perusahaan. Kepemilikan institusional diyakini memiliki dampak yang besar terhadap aktivitas manajemen, khususnya strategi strategi pengurangan kewajiban pajak. Kepemilikan institusional mengacu pada jumlah total saham yang dimiliki oleh suatu entitas (Dakhli, 2022). berdasarkan pendapat dari "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak (Kartika dan Setiawan, 2021). Bisnis yang memiliki banyak investor institusional memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melakukan kecurangan terhadap sistem. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan sering kali ingin mengurangi risiko pajak yang dapat membahayakan kredibilitas mereka. Formula ini digunakan untuk menyelidiki hubungan antara kepemilikan institusional dan strategi pengurangan kewajiban pajak dalam penelitian "Kepemilikan Institusional dan Praktik strategi pengurangan kewajiban pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Indonesia yang dilaksanakan oleh Nugroho dkk. (2022). Ketika ada kepemilikan institusional, berarti manajemen lebih dimonitor secara ketat dan kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam praktik yang tidak etis seperti strategi pengurangan kewajiban pajak yang agresif. Tetapi jika strategi pengurangan kewajiban pajak dipandang memiliki imbalance moneter yang besar, maka kepemilikan institusional dapat memberikan insentif. Variabel X2 : Komite Audit Salah satu bagian dari tata kelola perusahaan adalah tugas komite audit, yang meliputi pengawasan terhadap hal-hal seperti sistem pengendalian internal, laporan keuangan, dan peraturan perpajakan. Menemukan jumlah anggota yang ideal dengan latar belakang akuntansi atau keuangan yang kuat adalah cara umum untuk mengidentifikasi ukuran komite audit yang tepat. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian "Peran

Komite Audit dalam Mengurangi strategi pengurangan kewajiban pajak di Perusahaan Indonesia oleh Siregar dan Sukmawati (2020), memiliki anggota komite audit yang memiliki pengalaman keuangan secara signifikan berdampak pada berkurangnya teknik strategi pengurangan kewajiban pajak.

"Komite Audit dan Pengaruhnya terhadap Praktik strategi pengurangan kewajiban pajak di Indonesia (Handayani, 2019) memperluas gagasan ini dengan mengatakan bahwa komite audit yang lebih besar berhubungan positif dengan kepatuhan pajak. Meminimalkan kemungkinan strategi pengurangan kewajiban pajak dapat dicapai dengan upaya komite audit yang kompeten untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas bisnis. Agar komite audit dapat berhasil dalam kenyataannya, ukuran dan pengetahuan serta pengalaman para anggotanya adalah pertimbangan yang paling penting. Variabel X3 : Kualitas Audit Seberapa baik seorang auditor menemukan dan melaporkan kesalahan besar dalam laporan keuangan adalah apa yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang kualitas audit. Salah satu metrik umum untuk kualitas audit adalah reputasi kantor akuntan publik, apakah itu Big Four atau non- Big Four.

1 "Rumus yang digunakan biasanya berupa variabel dummy : Nilai 1 = Perusahaan yang memakai jasa KAP The Big Four atau empat KAP yang paling besar di dunia sebagai auditor. Nilai 0 = Perusahaan yang tidak memakai jasa KAP The Big Four atau empat KAP yang paling besar di dunia sebagai auditor Lebih sedikit strategi pengurangan kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four, berdasarkan pendapat dari penelitian Widyaningrum dan Setiawati (2020) yang berjudul "Pengaruh Kualitas Audit terhadap Praktik strategi pengurangan kewajiban pajak di Indonesia . Penelitian "Kualitas Audit dan Hubungannya dengan Kepatuhan Pajak Perusahaan Publik di Indonesia yang dilaksanakan oleh Prasetyo (2021) mengungkapkan bahwa auditor yang memiliki reputasi yang baik akan lebih mampu menjaga objektivitas dan mencegah kemungkinan terjadinya strategi pengurangan kewajiban pajak. Mengurangi prevalensi strategi

strategi pengurangan kewajiban pajak yang agresif dengan mengandalkan laporan keuangan yang diaudit dengan standar kualitas yang tinggi.

3.5.2. Variabel Dependen (Y) Variabel Y : Tax Avoidance Perusahaan berpartisipasi dalam strategi pengurangan kewajiban pajak untuk menurunkan penghasilan kena pajak secara sah. Dengan angka ETR yang rendah, strategi pengurangan kewajiban pajak lebih mungkin dilakukan. Salah satu perspektif strategi pengurangan kewajiban pajak, seperti yang dinyatakan oleh Hasan dkk. (2021), adalah mengurangi pendapatan dari akuntansi sebelum pajak. Menilai strategi pengurangan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma ETR (Dakhli, 2022). Rumus untuk menentukan ETR adalah sebagai berikut: Sebagai cara untuk mengukur sejauh mana perusahaan publik di Indonesia menghindari pajak, penelitian Suryani dan Putri (2019) yang berjudul "Praktik strategi pengurangan kewajiban pajak di Indonesia: Analisis Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Publik menggunakan ETR. Perusahaan yang memiliki ETR rendah cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang kurang efektif, berdasarkan pendapat dari Rahman dkk. (2020) dalam "Tax Avoidance, Corporate Governance, and Firm Performance: Bukti dari Indonesia". Alasan utama strategi pengurangan kewajiban pajak dibahas adalah karena meskipun dapat memberikan penghematan pajak secara langsung, strategi pengurangan kewajiban pajak juga membawa bahaya masalah hukum dan kerusakan citra perusahaan.

3.5.3. Operasional Variabel

Anda dapat menemukan penjelasan rinci tentang signifikansi setiap variabel, indikator yang dapat diukur, dan skala yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi setiap variabel penelitian dalam tabel operasional variabel. Tabel operasional variabel ini memungkinkan penelitian yang lebih terorganisir dengan aspek-aspek yang didefinisikan secara eksplisit dan terukur dari setiap variabel.

3.6 Analisis Data Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini menguji dampak dari faktor-faktor independen termasuk kepemilikan institusional (KI), komite audit (KuA), dan kualitas

audit (KoA) terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak (Y). **36** Metode ini dipilih karena memungkinkan evaluasi secara simultan pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. **4 8 26** Uji statistik yang digunakan untuk penelitian ini, seperti uji hipotesis, statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik, semuanya dijalankan dengan menggunakan aplikasi EViews versi 13. **8 3.6 41** 1 Uji Statistik Deskriptif Data yang diterapkan dalam kajian ini dirangkum dengan menggunakan uji statistik deskriptif. **1 5 9 12 18** Sebagai bagian dari uji ini, kami menghitung rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum untuk semua variabel. Badewin (2019) berpendapat bahwa uji deskriptif sangat penting untuk mengetahui bagaimana data terdistribusi dan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda akurat. Uji ini digunakan untuk mempersiapkan data untuk pengujian selanjutnya dan untuk memastikan bahwa nilai variabel yang digunakan beragam. **3.6 10 27** 2 Uji Asumsi Klasik Untuk memastikan model regresi linier berganda tidak melanggar asumsi-asumsi dasar, maka dilakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Multikolinieritas dan heteroskedastisitas adalah dua asumsi tradisional yang harus diperiksa pada riset ini. **3.6.3 Uji** Multikolinieritas Ketika mengestimasi koefisien regresi, penting untuk memeriksa adanya multikolinieritas, yang terjadi ketika ada tingkat korelasi yang signifikan antara variabel independen. berdasarkan pendapat dari Duru Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021), masalah multikolinieritas muncul ketika nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih tinggi dari 10. **3.6.4 Uji Heteroskedastisitas** Memverifikasi varians kesalahan yang konstan dalam model regresi adalah tujuan dari pengujian ini. Uji Breusch-Pagan dan uji White dapat digunakan untuk memeriksa heteroskedastisitas. berdasarkan pendapat dari Leria Pramesti Nurhidayah (2021), tingkat heteroskedastisitas yang tinggi mengindikasikan bahwa model regresi tidak mampu meramalkan varians data secara memadai. **3.7. 9 31** Analisis Regresi Data Panel Dengan

bantuan aplikasi EViews versi 13, analisis data yang dilakukan pada riset ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor independen berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan bagaimana hubungannya dengan variabel dependen, peneliti menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:  $Y = \beta_0 + \beta_1 KI + \beta_2 KuA + \beta_3 KoA + \varepsilon$  Keterangan : Y adalah variabel dependen yaitu Tax Avoidance (strategi pengurangan kewajiban pajak),  $\beta_0$  adalah konstanta,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  adalah koefisien regresi, KI adalah Kepemilikan Institusional, KuA adalah Komite Audit, KoA adalah Kualitas Audit,  $\varepsilon$  adalah faktor pengganggu.

### 3.8. Uji Hipotesis

Setelah asumsi-asumsi tradisional telah diperiksa, kita dapat menguji hipotesis kita tentang bagaimana faktor-faktor independen yang berbeda memberikan dampak terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak (Y). Uji F, uji t, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah tiga alat statistik utama yang diterapkan dalam kajian ini.

#### 3.8.1 Uji Statistik F

Untuk menentukan apakah seluruh model regresi signifikan secara statistik, digunakan uji ini. Jika faktor-faktor independen dapat menjelaskan variabel dependen ketika diambil secara bersama-sama, uji F akan mengungkapkannya. Berdasarkan pendapat dari Iqbal Syeh Maulana dan Mujiyati (2021), model yang dibangun cukup menjelaskan varians data, yang ditunjukkan dengan temuan uji F yang signifikan.

#### 3.8.2 Uji Statistik t

Untuk mengetahui bagaimana masing-masing variabel independen memberikan dampak terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan uji-t. Ketika nilai t hitung melebihi nilai t tabel, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak.

#### 2 Kepemilikan institusional secara signifikan mengurangi strategi pengurangan kewajiban pajak, berdasarkan pendapat dari penelitian Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021), meskipun komite audit tidak.

#### 3.8.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Sejauh mana model dapat menjelaskan perubahan dalam

variabel dependen ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Jika model regresi memiliki  $R^2$  yang tinggi berarti dapat menjelaskan sebagian besar variansi data. Model regresi linier berganda yang diantisipasi dapat memberikan nilai  $R^2$  yang cukup pada riset ini, mengindikasikan bahwa strategi pengurangan kewajiban pajak dipengaruhi oleh efek gabungan dari Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kualitas Audit (Badewin, 2019). 3

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini mengandalkan laporan keuangan dan laporan tahunan dari bisnis pertambangan yang diperdagangkan di BEI antara tahun 2019 dan 2024 sebagai sumber data sekunder. 16 Situs web perusahaan dan situs web resmi ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) adalah dua sumber terpercaya yang digunakan untuk mengumpulkan data ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara strategi pengurangan kewajiban pajak perusahaan dan ketiga variabel independen sekaligus. Dengan menggunakan serangkaian kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, para peneliti menggunakan strategi pemilihan purposif untuk memilih peserta penelitian. Tiga puluh perusahaan pertambangan dipilih sebagai sampel dari delapan puluh tiga perusahaan yang memenuhi persyaratan. Sebanyak 180 titik data penelitian diambil dari enam tahun pengamatan.

#### 4.2 Uji Prasyarat Analisis 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menguji empat variabel: strategi pengurangan kewajiban pajak (variabel Y), kepemilikan institusional (variabel X), komite audit (variabel Y), dan kualitas audit (variabel X). Temuan dari analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut: Nilai minimum sebesar 0,010000 diperoleh melalui penggelapan pajak. Pada tahun 2020 dan 2024, PT Bina Buana Raya Pelayaran Nasional dan PT ABM Investama Tbk masing-masing mencapai nilai tersebut. Sementara itu, PT Samindo Resources Tbk mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan nilai 12,81000. Standar deviasi variabel ini adalah 1.316122, median 0.235000, dan rata-rata 0.487056. Hal ini mengindikasikan bahwa taktik strategi pengurangan kewajiban pajak perusahaan sampel

sangat bervariasi. Nilai minimum untuk kepemilikan institusional adalah 0.100000. PT Bayan Resources Tbk memperoleh jumlah ini antara tahun 2021 dan 2024. Pada rentang waktu 2019-2024, PT Samindo Resources Tbk mencapai puncaknya di angka 732,1100. Standar deviasi variabel ini adalah 175.5705, median 0.660000, dan rata-rata 47.45356. Terdapat rentang nilai yang besar untuk variabel ini dan kemungkinan adanya outlier terlihat jelas dari hal ini. Nilai minimum sebesar satu juta dicapai oleh komite audit. Baik PT Baramulti Suksessarana Tbk pada tahun 2024 dan PT Sumber Global Energy Tbk pada tahun 2022 menyediakan data yang digunakan untuk menghitung statistik ini. Pada saat yang sama, PT Petrosa Tbk mencapai nilai puncak 5.000000 antara tahun 2022 dan 2024. Standar deviasi sebesar 0.639677, median 2.000000, dan rata-rata 2.244444 membentuk variabel ini. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar komite audit organisasi terdiri dari dua atau tiga orang. Nilai minimum 0,000000 digunakan untuk menunjukkan kualitas audit. Perusahaan yang bukan adalah bagian dari KAP Big Four adalah sumber data ini. Pada saat yang sama, jika KAP Big Four mengaudit perusahaan, nilai maksimumnya adalah satu juta. **12** Statistik ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0.416667, yang mengindikasikan bahwa perusahaan sampel telah menggunakan auditor KAP Big Four. Variabel ini memiliki standar deviasi sebesar 0.494382 dan median sebesar 0.000000. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas perusahaan yang menjadi sampel pada riset ini tidak menggunakan auditor yang kompeten. Secara global, perusahaan akuntansi yang paling terkemuka yang menawarkan jasa akuntansi profesional dikenal sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four. Menteri Keuangan telah memberikan lisensi kepada KAP, sebuah entitas komersial, sehingga akuntan publik dapat memberikan layanan mereka di sana. Perusahaan-perusahaan dengan ukuran tertentu sering menggunakan jasa akuntan publik bersertifikat untuk berbagai tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada audit laporan keuangan dan

pengembalian pajak, serta analisis laporan tersebut. **37** Deloitte, Ernst & Young (EY), Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), dan PricewaterhouseCoopers (PwC) adalah KAP Big Four.

#### 4.2.2 Uji Pemilihan Model

Regresi Data Panel Model CEM, FEM, dan REM adalah tiga pilihan yang tersedia untuk regresi data panel. Untuk menentukan model penelitian yang paling populer, tiga percobaan dilakukan: Temuan-temuan berikut ini berasal dari Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier: Temuan-temuan ini mendukung kesimpulan bahwa CEM adalah model yang paling tepat untuk investigasi ini.

#### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Di antara model-model yang diuji, CEM memiliki kinerja yang paling baik. Penelitian ini menggunakan uji asumsi konvensional sebagai bagian dari CEM. Kami akan menggunakan Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi, dua uji asumsi tradisional. Uji tersebut adalah sebagai berikut:

#### 4.2.4 Uji Multikolinearitas

Untuk menghindari masalah dalam menginterpretasikan hasil regresi yang disebabkan oleh variabel independen yang berkorelasi tinggi, pengujian multikolinieritas adalah bagian penting dari analisis regresi. mengacu pada gambar hasil pengujian multikolinearitas diatas, diperoleh matriks korelasi antar variabel independen yaitu X1 (Kepemilikan Institusional), X2 (Komite Audit), X3 (Kualitas Audit). Dari tabel korelasi tersebut, terlihat bahwa korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0.2297, antara X1 dan X3 sebesar 0.3158, serta antara X2 dan X3 sebesar 0.3121. Nilai korelasi ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang sangat tinggi (biasanya di atas 0,8 atau 0,9) antar variabel independen, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi ini. Terdapat sedikit korelasi antara X1, variabel yang mewakili persentase saham yang dimiliki oleh institusi, X2, pengawas internal, dan X3, variabel yang mewakili keandalan laporan keuangan. Hal ini signifikan karena memungkinkan adanya kontribusi yang berbeda dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen tanpa

menimbulkan duplikasi data yang tidak perlu. 4.2.5 Uji

Heteroskedastisitas Dengan koefisien sebesar 0.000425 dan tingkat signifikansi sebesar 0.0106, hasil analisis regresi data panel dengan metode Estimated Generalized Least Squares (EGLS) mengindikasikan bahwa variabel Kepemilikan Institusional secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak. **25** Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan lebih cenderung melakukan strategi pengurangan kewajiban pajak ketika persentase yang lebih besar dari saham mereka dimiliki oleh institusi. Hal ini mengindikasikan bahwa investor institusional dapat mendorong optimalisasi efisiensi pajak oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan, bahkan jika hal ini dapat menyebabkan strategi pengurangan kewajiban pajak yang agresif. Meskipun variabel Komite Audit memiliki koefisien positif sebesar 0.000532, nilai probabilitas sebesar 0.4065 berarti tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, tidak ada hubungan yang terlihat antara kecenderungan perusahaan untuk melakukan strategi pengurangan kewajiban pajak dengan keberadaan komite audit dalam kerangka tata kelola perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengawasan yang tidak efektif atau ketidakmampuan anggota komite audit dalam hal perpajakan. Variabel Kualitas Audit, sebaliknya, memiliki sedikit pengaruh negatif terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak; koefisiennya adalah - 0.01822 dan tingkat signifikansinya adalah 0.0590. Auditor yang kompeten dan independen dapat mengidentifikasi dan mencegah metode manipulatif dalam pelaporan keuangan, sehingga perusahaan yang diauditnya cenderung tidak akan melakukan strategi pengurangan kewajiban pajak. 4.2.6 Analisis Regresi Data Panel Persamaan regresi berikut ini dapat diturunkan dari data pada tabel 4.2.6.  $Y = 0.555799 + 0.001694 + (-0.025901) + (-0.025900) + \epsilon$  Dari persamaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Akibatnya, perusahaan yang berinvestasi pada auditor terbaik akan dipantau dengan lebih baik dan lebih mungkin untuk mematuhi

undang-undang perpajakan. Upaya untuk mencegah metode strategi pengurangan kewajiban pajak oleh perusahaan bergantung pada audit yang berkualitas tinggi **42** 1. Koefisien determinasi sebesar 0.555799, sebagaimana ditentukan oleh analisis regresi linier berganda. Angka yang tetap ini mengindikasikan bahwa besarnya strategi pengurangan kewajiban pajak Perusahaan tetap sebesar 0.555799 meskipun semua faktor independen, seperti Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kualitas Audit, dianggap bernilai nol atau tidak memberikan dampak terhadap hasil. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pengurangan kewajiban pajak memiliki dampak yang konstan atau mendasar yang tidak tergantung pada ketiga variabel independen yang dipertimbangkan tetapi masih rentan terhadap pengaruh dari sumber lain. Oleh karena itu, konstanta ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain seperti leverage, profitabilitas, atau strategi manajemen lainnya masih dapat menjelaskan tingkat strategi pengurangan kewajiban pajak, bahkan ketika perusahaan tidak memiliki kepemilikan institusional yang memadai, komite audit, atau kualitas audit. Analisis regresi menghasilkan nilai 0.001694, yang mewakili koefisien variabel kepemilikan institusional. Koefisien positif ini berarti bahwa, semua hal lain dianggap sama, akan ada kenaikan 0,001694 dalam strategi pengurangan kewajiban pajak untuk setiap kenaikan 1 unit dalam kepemilikan institusional. mengacu pada hasil ini, jelas bahwa kepemilikan institusional tidak membantu mengurangi metode strategi pengurangan kewajiban pajak dan bahkan dapat membuat perusahaan lebih mungkin untuk melakukannya. Hal ini dapat terjadi jika investor institusional perusahaan memprioritaskan keuntungan jangka pendek dalam kinerja keuangan atau efisiensi pajak di atas pertumbuhan jangka panjang laba bersih perusahaan. Selama hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada bahaya hukum, pihak institusional mungkin bersedia mengabaikan taktik manajemen pajak yang agresif. Jadi, temuan ini mengindikasikan bahwa status institusi sebagai pemegang saham tidak selalu adalah

cara yang baik untuk mengawasi strategi pengurangan kewajiban pajak. Temuan ini menambah khazanah keilmuan tentang tata kelola perusahaan, terutama yang berkaitan dengan keruhnya fungsi pemilik institusional dalam kebijakan perpajakan perusahaan. Koefisien sebesar -0.025901 ditemukan untuk variabel Komite Audit dalam temuan regresi. Dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, nilai koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa jumlah strategi pengurangan kewajiban pajak akan menurun sebesar 0,025901 untuk setiap kenaikan 1 unit efisiensi Komite Audit. Kesimpulan ini mendukung gagasan bahwa memiliki komite audit yang efisien dapat menjadi alat bagi pengawas untuk mengurangi strategi pengurangan kewajiban pajak. Pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan manajemen pajak yang wajar dan sesuai hukum adalah tanggung jawab komite audit yang aktif dan tidak memihak.

**38** Frekuensi rapat, independensi anggota, dan keahlian akuntansi dan keuangan adalah indikator umum dari efektivitas komite audit. Oleh karena itu, temuan ini mendukung pernyataan bahwa untuk mengurangi kemungkinan manajemen menyalahgunakan peraturan perpajakan, sangat penting untuk meningkatkan peran dan komposisi komite audit di dalam organisasi. Oleh karena itu, jelas bahwa keterlibatan komite audit dalam tata kelola perusahaan yang efektif secara signifikan berdampak pada praktik strategi pengurangan kewajiban pajak perusahaan yang agresif. mengacu pada temuan studi regresi, variabel Kualitas Audit memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0.025900. **1** Hal ini mengindikasikan bahwa ketika kualitas audit meningkat, maka strategi pengurangan kewajiban pajak perusahaan akan menurun. Artinya, untuk setiap peningkatan satu standar deviasi dalam kualitas audit, kemungkinan teknik strategi pengurangan kewajiban pajak akan turun sebesar 0.025900, dengan asumsi perusahaan mempekerjakan auditor dengan kualitas yang sangat baik. Studi ini memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa auditor dengan reputasi yang baik atau yang bekerja untuk salah satu KAP Big Four lebih mungkin untuk menjadi

kompeten dan tidak memihak dalam hal menandai kemungkinan pelanggaran pajak atau praktik pajak yang agresif. 4.3 Uji Hipotesis Untuk mengetahui hasil dari hipotesis yang telah dikembangkan dengan mempertimbangkan keadaan populasi dan sampel penelitian. Berikut ini adalah contoh-contoh pengujian hipotesis yang telah dilakukan: 4.3.1 Uji Kelayakan Model (Uji F) Dengan ambang batas signifikansi  $\alpha = 5\%$ , derajat kebebasan ( $df_1$ )  $(k-1) = 3$ , dan derajat kebebasan ( $df_2$ )  $(n-k) = 176$ , uji F dilakukan untuk memastikan perlunya analisis penelitian tambahan dan untuk memastikan dampak secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. **11** Tujuan dari uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen, strategi pengurangan kewajiban pajak (Y), dipengaruhi secara signifikan oleh ketiga variabel independen dalam model regresi yaitu kepemilikan institusional (X1), komite audit (X2), dan kualitas audit (X3). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan apakah model regresi yang dibangun sesuai untuk tujuan penelitian. Untuk melakukan pengujian, kita harus membandingkan nilai F-Statistic hasil pengolahan data dengan nilai F Tabel dan melihat nilai probabilitas (sig). mengacu pada data yang telah diolah, F-Statistic sebesar 2,801 dan F Tabel sebesar 2,656 pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah degree of freedom tertentu. Selanjutnya, probabilitas yang dihitung (Prob F-Statistic) adalah 0,041407. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa nilai F-Statistic lebih besar dari nilai F Tabel ( $2,801 > 2,656$ ) dan nilai Prob (F-Statistic) lebih kecil dari 0,05 ( $0,041407 < 0,05$ ). Karena kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh penting terhadap metode strategi pengurangan kewajiban pajak, maka model regresi yang diterapkan dalam kajian ini sesuai untuk penelitian selanjutnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel strategi pengurangan kewajiban pajak dapat dijelaskan secara memadai oleh ketiga variabel independen tersebut jika dilihat secara keseluruhan. Oleh karena itu, korelasi antara prosedur tata kelola

perusahaan dan kecenderungan strategi pengurangan kewajiban pajak dapat diselidiki dengan menggunakan model regresi ini.

#### 4.3.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Untuk mengetahui seberapa baik model regresi menjelaskan varians dalam variabel independen yang berdampak pada variabel dependen, seseorang menggunakan koefisien determinasi.

berdasarkan pendapat dari pengujian ini, semakin kuat hubungan antara variabel independen dan dependen, maka angka Adjusted R-squared akan semakin mendekati angka 100%. Variabel independen pada riset ini-kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit-mampu menjelaskan 4,56% variasi variabel dependen- strategi pengurangan kewajiban pajak-sesuai dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), yaitu sebesar 0.045583 atau 4,56%. Sementara itu, faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam model menjelaskan 95,44% sisanya. Modifikasi terhadap jumlah variabel dalam model ditunjukkan oleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,029315. Uji F menunjukkan signifikansi, oleh karena itu meskipun angkanya kecil, model masih terlihat masuk akal. Meskipun model tidak dapat menjelaskan banyak hal, model ini masih berguna untuk penelitian.

#### 4.3.3 Uji Parsial (Uji t) Mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah tujuan dari pengujian ini.

Jika nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen dan dependen memiliki pengaruh yang signifikan. Tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel jika nilai probabilitas t-statistik lebih besar dari 0,05. Hasil dari uji t yang dilakukan pada riset ini adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Institusional ( $X_1$ ) memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance ( $p = 0,0045 < 0,05$ ). Komite Audit ( $X_2$ ) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance ( $p = 0,8725 > 0,05$ ). Kualitas Audit ( $X_3$ ) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance ( $p = 0.3087 > 0,05$ ). Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap Tax Avoidance ( $p = 0.0414 < 0.05$ ,  $F = 2.801 > F_{tabel} = 2.656$ ). 4.4 Pembahasan temuan studi Menganalisis dan mendiskusikan data yang dihasilkan dari serangkaian pengujian adalah tahap terakhir dalam bab IV penelitian ini setelah pengujian selesai. 4.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (H1) Seperti yang ditunjukkan oleh pengujian statistik, Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang signifikan, dengan nilai p-value sebesar  $0.0045 < 0.05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kepemilikan institusional dengan kemungkinan praktik strategi pengurangan kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan. Temuan ini sesuai dengan teori keagenan yang mendalilkan bahwa oportunistik strategi pengurangan kewajiban pajak oleh manajer dapat dibatasi oleh mekanisme pengawasan dari kepemilikan institusional. Sebagai pemegang saham besar, institusi sering kali peduli dengan masa depan perusahaan dan ingin perusahaan memiliki reputasi yang baik di mata pemerintah dalam segala aspek, termasuk pajak. Oleh karena itu, mereka biasanya menyarankan manajemen untuk tidak menggunakan taktik strategi pengurangan kewajiban pajak yang agresif, meskipun taktik tersebut diperbolehkan. Konsisten dengan penelitian sebelumnya, data ini mendukung gagasan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap aktivitas strategi pengurangan kewajiban pajak (Azka Nurmala Devi dan Abdul Rohman, 2024). Sri Mulyani, Anita Wijatanti, dan Endang Masitoh (2018) menemukan temuan yang serupa, menyatakan bahwa penggelapan pajak pada bisnis pertambangan yang terdaftar di BEI dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kepemilikan institusional. Temuan tambahan dari penelitian Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2020) mengindikasikan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan institusional. 4.4.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (H2) mengacu pada hasil pengujian hipotesis kedua (H2), tidak terdapat hubungan yang signifikan antara strategi

pengurangan kewajiban pajak dengan variabel komite audit. Hipotesis kedua pada riset ini ditolak karena nilai signifikansi sebesar 0.8725 lebih besar dari ambang batas signifikansi 0.05. Jika komite audit tidak cukup kuat dalam struktur tata kelola perusahaan, maka perusahaan akan melakukan strategi pengurangan kewajiban pajak. Secara teoritis, peran komite audit dalam tata kelola perusahaan adalah mengawasi independensi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Namun, peran pengawasan komite audit belum berjalan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh temuan yang tidak signifikan. Temuan ini membantah hipotesis yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit memberikan dampak terhadap strategi pajak perusahaan. Hal ini mendukung temuan studi Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) yang menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak. temuan studi Azka Nurmala Devi dan Abdul Rohman (2024) menguatkan temuan studi ini, mereka menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Lebih lanjut, temuan penelitian ini menguatkan temuan I. Fathurrahman dkk. (2024) yang menemukan tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara komite audit dan penggelapan pajak.

#### 4.4.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (H3)

Hipotesis ketiga (H3) ditolak karena tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara Kualitas Audit (X3) dengan strategi pengurangan kewajiban pajak. Hipotesis nol (H3) ditolak karena nilai signifikansi ( $p = 0.3087 > 0.05$ ) lebih tinggi dari ambang batas yang telah ditentukan yaitu 0.05. temuan studi ini mengindikasikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap metode strategi pengurangan kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Salah satu alat pengawasan eksternal yang berdasarkan pendapat dari teori tata kelola perusahaan seharusnya dapat mengawasi aktivitas manajemen yang dapat memberikan

dampak terhadap para pemangku kepentingan, seperti strategi pengurangan kewajiban pajak, adalah kualitas audit. Namun, temuan ini mengindikasikan bahwa memiliki auditor yang kompeten saja tidak cukup untuk menghentikan penggelapan pajak. Kesimpulan penelitian ini bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak konsisten dengan penelitian Azka Nurmala Devi dan Abdul Rohman (2024). Selanjutnya, tidak ada hubungan antara kualitas audit dan penggelapan pajak, berdasarkan pendapat dari Leria Pramesti Nurhidayah dkk. (2021). Terakhir, meskipun terdapat beberapa ketidakkonsistenan dan kurangnya keseragaman dalam temuan studi, Khoirul Garda Wijaya (2023) menemukan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang baik. Hal ini dapat terjadi karena taktik strategi pengurangan kewajiban pajak sering kali dilakukan di dalam hukum, sehingga sulit ditemukan oleh auditor luar.

#### 4.4.4 Pengaruh Secara Simultan Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (H4)

Uji statistik yang dilakukan pada riset ini menghasilkan nilai F-Statistic sebesar 2,801, yang lebih tinggi dari nilai F Tabel sebesar 2,656. Selain itu, ambang batas signifikansi sebesar 0,05 lebih kecil dari nilai probabilitas (Prob. F-Statistic) sebesar 0,041407. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi penelitian ini dapat diterima untuk penelitian selanjutnya karena memenuhi kriteria signifikansi statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa penggelapan pajak secara signifikan dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional secara bersamaan. Penelitian sebelumnya telah mengindikasikan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak ketika digunakan secara bersama-sama (Rasyid, Wiralestari, dan Friyani, 2023). memiliki dampak yang cukup besar terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak. Sebuah studi lebih lanjut oleh Dzawil Al Bayhaqi (2022) menambahkan bukti ini dengan mengklaim bahwa komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan

institusional memiliki dampak besar pada strategi pengurangan kewajiban pajak-meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Terakhir, strategi pengurangan kewajiban pajak di industri pertambangan dipengaruhi oleh semua komponen GCG, berdasarkan pendapat dari Sri Mulyani dkk. (2018). Hasil ini memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa kepemilikan institusional, kehadiran dan efektivitas komite audit dalam tata kelola perusahaan, dan audit berkualitas tinggi yang dilaksanakan oleh auditor eksternal, semuanya berperan dalam membentuk kebijakan strategi pengurangan kewajiban pajak yang diadopsi oleh perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kecenderungan perusahaan untuk melakukan strategi pengurangan kewajiban pajak dapat dikurangi dengan penggunaan ketiga faktor tersebut secara efektif. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dan pengawasan yang baik sangat penting untuk membuat pelaporan pajak menjadi terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Kepemilikan institusional terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak. **19** Artinya, semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik strategi pengurangan kewajiban pajak akan semakin rendah. Hal ini dapat dijelaskan melalui peran institusi sebagai investor profesional yang mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik serta meningkatkan tekanan terhadap manajemen untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. **33** Komite audit memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, termasuk regulasi perpajakan. Keberadaan komite audit yang efektif berkontribusi terhadap pengurangan praktik strategi pengurangan kewajiban pajak karena mereka dapat mendeteksi dan mengontrol potensi penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan. **45** Kualitas audit eksternal juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas informasi keuangan. Audit yang dilaksanakan oleh auditor berkualitas tinggi meningkatkan keandalan laporan keuangan, sehingga mengurangi

kemungkinan perusahaan menyembunyikan atau menghindari kewajiban perpajakan. Auditor eksternal yang independen dan kompeten dapat memberikan tekanan kepada manajemen agar bertindak secara akuntabel. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit memiliki peran yang saling melengkapi dalam memengaruhi tingkat strategi pengurangan kewajiban pajak. Di antara ketiganya, kepemilikan institusional terbukti sebagai faktor yang paling dominan dalam menurunkan tingkat strategi pengurangan kewajiban pajak perusahaan pertambangan di Indonesia selama periode penelitian. Analisis data dan pembahasan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: praktik strategi pengurangan kewajiban pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI (BEI) selama tahun 2019-2024 dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit secara bersamaan. Kepemilikan institusional secara signifikan dan negatif memberikan dampak terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak, mengacu pada analisis data panel terhadap 180 observasi dari 30 perusahaan. Artinya, kecenderungan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya berkurang ketika tingkat kepemilikan institusional meningkat. Di sisi lain, kurangnya dampak yang terlihat dari komite audit terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak, mungkin mengindikasikan bahwa struktur ini kurang ideal untuk mengatur prosedur kepatuhan pajak. Perusahaan dengan kualitas audit yang tinggi sering terlibat dalam manajemen pajak yang lebih patuh terhadap peraturan, karena kualitas audit mempunyai dampak negatif dan substansial pada strategi pengurangan kewajiban pajak. Kontribusi empiris dari penelitian ini adalah untuk memajukan pengetahuan kita tentang proses tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan penggelapan pajak di Indonesia, khususnya di industri pertambangan.

5.2. Keterbatasan Penelitian Ketika menganalisis dan menerapkan data, penting untuk diingat bahwa penelitian ini memiliki sejumlah

keterbatasan. Analisis ini tidak dapat diterapkan pada industri lain dengan struktur atau fitur manajemen yang berbeda karena hanya berfokus pada bisnis sektor pertambangan yang terdaftar di BEI (BEI) dari tahun 2019 hingga 2024. Kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit adalah satu-satunya variabel independen yang dimasukkan dalam analisis ini. **22** Sebagai alternatif, faktor-faktor seperti leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal dapat memberikan dampak terhadap strategi pengurangan kewajiban pajak.

Menilai faktor strategi pengurangan kewajiban pajak dengan metode ETR (Effective Tax Rate), yang tidak secara menyeluruh menangkap semua bentuk strategi pengurangan kewajiban pajak. Penelitian ini tidak memperhitungkan faktor mediasi atau moderasi ketika menggunakan regresi data panel, yang mungkin dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antar variabel. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menarik kesimpulan yang luas dari temuan penelitian ini karena temuan ini bersifat kontekstual dan membutuhkan lebih banyak pengujian di berbagai situasi. 5.3. Saran mengacu pada temuan dan keterbatasan penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait. Untuk memberikan lapisan pengawasan eksternal bagi manajemen perusahaan, disarankan agar persentase kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan saham perusahaan ditingkatkan. Karena institusi seringkali memiliki kemampuan dan motivasi untuk mendorong keterbukaan dan pengawasan yang ketat, dan temuan mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi teknik strategi pengurangan kewajiban pajak. Kemungkinan manajer untuk melakukan tindakan oportunistik yang merugikan pemegang saham dan negara akan berkurang ketika pemegang saham institusional bertindak sebagai pengawas, sesuai dengan teori keagenan. Temuan studi ini mendukung penelitian lain yang mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional yang kuat dapat menghambat perilaku oportunistik manajerial, seperti

strategi pengurangan kewajiban pajak (Astuti et al., 2020; 51 Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana, 2021). Hal ini mengikuti logika teori keagenan yang menyatakan bahwa manajer harus diawasi oleh pemilik (prinsip-al). Kebijakan pajak perusahaan dapat diawasi dengan lebih baik dan didiskusikan secara lebih terbuka jika lebih banyak institusi yang menjadi pemegang saham. Perusahaan juga diharapkan dapat mengoptimalkan peran komite audit dengan memastikan bahwa anggotanya memiliki kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi serta menjamin independensi dan frekuensi rapat yang memadai. Temuan penelitian dan teori corporate governance menyatakan bahwa komite audit yang aktif dan berkompeten berkontribusi dalam mengurangi praktik tax avoidance. Meningkatkan fungsi dan kualitas anggota komite audit untuk meningkatkan efisiensi pengawasan, sebagaimana penelitian Haris dan Santoso (2019) mengindikasikan bahwa strategi pengurangan kewajiban pajak berhubungan negatif dengan frekuensi pertemuan dan kompetensi anggota komite audit. Terlepas dari temuan yang kontradiksi dalam literatur, presentasi ini dan bukti yang menyertainya mengindikasikan bahwa komite audit, ketika berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal, dapat mengurangi perilaku strategi pengurangan kewajiban pajak. berdasarkan pendapat dari penelitian yang dilaksanakan oleh Dewi & Adhariani (2020) dan Haris & Santoso (2019), terdapat korelasi negatif antara strategi pengurangan kewajiban pajak dengan frekuensi dan kompetensi rapat komite audit. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan strategi pengurangan kewajiban pajak berkurang ketika komite audit memiliki pengetahuan dan aktif. 17 35 Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan frekuensi pengawasan komite audit dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penelitian mengindikasikan bahwa kualitas audit memengaruhi pengurangan strategi pengurangan kewajiban pajak, oleh karena itu penting untuk memilih auditor eksternal secara hati-hati mengacu pada reputasi dan kemampuan

mereka. Auditor dengan reputasi yang baik lebih mungkin untuk melihat tanda bahaya dalam catatan keuangan, seperti kemungkinan penggelapan pajak, berdasarkan pendapat dari penelitian tersebut. Auditor yang berkualitas juga menjaga ketidakberpihakan dan kompetensi mereka dalam pekerjaan mereka. Temuan Mira dan Purnamasari (2020) bahwa kualitas audit secara signifikan mengurangi penggelapan pajak konsisten dengan hal ini. Penelitian Sri Mulyani dkk. (2018) dan Suwardi dkk. (2022) menemukan bahwa auditor yang sangat dihormati lebih baik dalam mendeteksi dan mencegah strategi pengurangan kewajiban pajak, sehingga memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa kualitas audit berhubungan dengan strategi pengurangan kewajiban pajak. Jika auditor dapat menemukan ketidakkonsistenan dalam laporan pajak, maka audit tersebut berkualitas tinggi. Untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepatuhan pajak, perusahaan harus mempekerjakan auditor eksternal dengan reputasi yang baik, seperti KAP Big Four. Hasil-hasil ini dapat digunakan oleh otoritas pajak dan regulator untuk mendukung pengembangan peraturan pengawasan yang lebih ketat untuk industri-industri utama dan untuk mendorong penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik oleh semua perusahaan. Studi kasus PT Kaltim Prima Coal dan PT Adaro Energy mengindikasikan bahwa industri pertambangan adalah kontributor utama pendapatan pajak sekaligus titik rawan bagi kegiatan strategi pengurangan kewajiban pajak. Untuk mengatasi masalah strategi pengurangan kewajiban pajak yang legal namun tidak etis, pihak berwenang harus membuat peraturan yang lebih ketat untuk pengawasan fiskal dan memberikan kontribusi terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Untuk menemukan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mengaruhi strategi pengurangan kewajiban pajak di Indonesia, penelitian-penelitian selanjutnya perlu memperluas fokusnya dengan memasukkan industri-industri lain dan memasukkan variabel-variabel tambahan seperti tanggung jawab sosial perusahaan, struktur kepemilikan

REPORT #27612971

manajerial, dan karakteristik dewan direksi. Industri lain mungkin memiliki sifat tata kelola dan ancaman strategi pengurangan kewajiban pajak yang berbeda; penelitian ini hanya mencakup industri pertambangan. Faktor-faktor lain, seperti struktur kepemilikan manajemen dan tanggung jawab sosial perusahaan, juga telah terbukti berdampak pada kebijakan pajak perusahaan dalam penelitian sebelumnya. Gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai elemen-elemen yang berdampak pada penggelapan pajak dapat diperoleh dengan menambahkan variabel-variabel tersebut. Tiga variabel-kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit-adalah subjek eksklusif dari penelitian ini, yang terbatas pada industri pertambangan. Faktor-faktor lain, seperti tanggung jawab sosial perusahaan (Dzawil Al Bayhaqi, 2022), kepemilikan oleh manajer, dan karakteristik dewan komisaris dan direksi (Rudiatun et al., 2023), telah dimasukkan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Dengan demikian, untuk mengatasi ketidaksesuaian hasil sebelumnya yang masih ada dalam literatur dan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan kontekstual, maka perlu dilakukan perluasan objek dan variabel.



REPORT #27612971

## Results

Sources that matched your submitted document.

● IDENTICAL ● CHANGED TEXT

INTERNET SOURCE		
1.	<b>0.43%</b> digilibadmin.unismuh.ac.id <a href="https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/42241-Full_Text.pdf">https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/42241-Full_Text.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
2.	<b>0.38%</b> www.journal.yp3a.org <a href="https://www.journal.yp3a.org/index.php/akua/article/download/3029/1172/131...">https://www.journal.yp3a.org/index.php/akua/article/download/3029/1172/131...</a>	●
INTERNET SOURCE		
3.	<b>0.32%</b> repository.unissula.ac.id <a href="http://repository.unissula.ac.id/38537/1/Akuntansi_31402200144_fullpdf.pdf">http://repository.unissula.ac.id/38537/1/Akuntansi_31402200144_fullpdf.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
4.	<b>0.32%</b> ejurnalunsam.id <a href="https://ejurnalunsam.id/index.php/jmas/article/download/10997/5279/">https://ejurnalunsam.id/index.php/jmas/article/download/10997/5279/</a>	●
INTERNET SOURCE		
5.	<b>0.31%</b> ojspustek.org <a href="https://ojspustek.org/index.php/SJR/article/download/847/590">https://ojspustek.org/index.php/SJR/article/download/847/590</a>	●
INTERNET SOURCE		
6.	<b>0.31%</b> repositori.uma.ac.id <a href="https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/26113/1/178330044%20...">https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/26113/1/178330044%20...</a>	●
INTERNET SOURCE		
7.	<b>0.3%</b> ojs3.unpatti.ac.id <a href="https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jp/article/download/15512/8871/">https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jp/article/download/15512/8871/</a>	●
INTERNET SOURCE		
8.	<b>0.28%</b> eprints.untirta.ac.id <a href="https://eprints.untirta.ac.id/16888/4/Nia%20Ariska_5552170092_03.pdf">https://eprints.untirta.ac.id/16888/4/Nia%20Ariska_5552170092_03.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
9.	<b>0.28%</b> repository.uinjkt.ac.id <a href="https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63076/1/NURJANAH..">https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63076/1/NURJANAH..</a>	●



REPORT #27612971

INTERNET SOURCE		
10.	0.27% repository.stei.ac.id <a href="http://repository.stei.ac.id/7629/4/BAB%203.pdf">http://repository.stei.ac.id/7629/4/BAB%203.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
11.	0.27% repository.uin-suska.ac.id <a href="http://repository.uin-suska.ac.id/17353/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf">http://repository.uin-suska.ac.id/17353/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
12.	0.26% jurnal.fe.unram.ac.id <a href="https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/download/189/130/861">https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/download/189/130/861</a>	●
INTERNET SOURCE		
13.	0.25% repositori.uin-alauddin.ac.id <a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id/24902/1/90400114065%20AAN%20QURAIISH...">http://repositori.uin-alauddin.ac.id/24902/1/90400114065%20AAN%20QURAIISH...</a>	●
INTERNET SOURCE		
14.	0.24% repository.unilak.ac.id <a href="https://repository.unilak.ac.id/4024/1/1862201069_BAB-I_VI_DAFTAR-PUSTAKA...">https://repository.unilak.ac.id/4024/1/1862201069_BAB-I_VI_DAFTAR-PUSTAKA...</a>	●
INTERNET SOURCE		
15.	0.23% repositori.stiamak.ac.id <a href="http://repositori.stiamak.ac.id/id/eprint/459/4/Bab%203.pdf">http://repositori.stiamak.ac.id/id/eprint/459/4/Bab%203.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
16.	0.22% jnka.ppj.unp.ac.id <a href="https://jnka.ppj.unp.ac.id/index.php/jnka/article/download/2/1">https://jnka.ppj.unp.ac.id/index.php/jnka/article/download/2/1</a>	●
INTERNET SOURCE		
17.	0.22% lib.unm.ac.id <a href="https://lib.unm.ac.id/storage/file_thesis/RZiV6b6wDOfPigt1bl03FCJMduSF2ucFR..">https://lib.unm.ac.id/storage/file_thesis/RZiV6b6wDOfPigt1bl03FCJMduSF2ucFR..</a>	●
INTERNET SOURCE		
18.	0.21% media.neliti.com <a href="https://media.neliti.com/media/publications/252010-pengaruh-auditor-relation...">https://media.neliti.com/media/publications/252010-pengaruh-auditor-relation...</a>	●
INTERNET SOURCE		
19.	0.2% journal.univpancasila.ac.id <a href="https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/download/1535/1089/...">https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/download/1535/1089/...</a>	●
INTERNET SOURCE		
20.	0.2% jurnal.umus.ac.id <a href="https://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/download/602/383/1057">https://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/download/602/383/1057</a>	●



REPORT #27612971

INTERNET SOURCE		
21.	<b>0.19%</b> penerbitgoodwood.com <a href="https://penerbitgoodwood.com/index.php/Jakman/article/download/3634/110...">https://penerbitgoodwood.com/index.php/Jakman/article/download/3634/110...</a>	●
INTERNET SOURCE		
22.	<b>0.18%</b> pdfs.semanticscholar.org <a href="https://pdfs.semanticscholar.org/70e6/d0156809e59cb814f9f3f2b94c44d5101c6...">https://pdfs.semanticscholar.org/70e6/d0156809e59cb814f9f3f2b94c44d5101c6...</a>	●
INTERNET SOURCE		
23.	<b>0.18%</b> eprints.ums.ac.id <a href="https://eprints.ums.ac.id/61410/13/BAB%201.pdf">https://eprints.ums.ac.id/61410/13/BAB%201.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
24.	<b>0.18%</b> repo.darmajaya.ac.id <a href="http://repo.darmajaya.ac.id/15917/10/Bab%203.pdf">http://repo.darmajaya.ac.id/15917/10/Bab%203.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
25.	<b>0.18%</b> repositori.buddhidharma.ac.id <a href="https://repositori.buddhidharma.ac.id/1088/3/COVER%20-%20BAB%20III.pdf">https://repositori.buddhidharma.ac.id/1088/3/COVER%20-%20BAB%20III.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
26.	<b>0.18%</b> eprints.undip.ac.id <a href="https://eprints.undip.ac.id/76760/1/15_SANTOSO.pdf">https://eprints.undip.ac.id/76760/1/15_SANTOSO.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
27.	<b>0.17%</b> online-journal.unja.ac.id <a href="https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/15257/11947/41805">https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/15257/11947/41805</a>	●
INTERNET SOURCE		
28.	<b>0.17%</b> journal.ukrim.ac.id <a href="https://journal.ukrim.ac.id/index.php/jem/article/download/89/73">https://journal.ukrim.ac.id/index.php/jem/article/download/89/73</a>	●
INTERNET SOURCE		
29.	<b>0.17%</b> tes-ojs.uin-alauddin.ac.id <a href="https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/download/6001/5167/">https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/download/6001/5167/</a>	●
INTERNET SOURCE		
30.	<b>0.16%</b> repository.unja.ac.id <a href="https://repository.unja.ac.id/21340/2/BAB%20V-dikonversi.pdf">https://repository.unja.ac.id/21340/2/BAB%20V-dikonversi.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
31.	<b>0.16%</b> journal.uny.ac.id <a href="https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/56571/19267">https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/56571/19267</a>	●



REPORT #27612971

INTERNET SOURCE		
32.	<b>0.14%</b> <a href="https://jaa.unram.ac.id">jaa.unram.ac.id</a>	●
	<a href="https://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/download/161/84/775">https://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/download/161/84/775</a>	
INTERNET SOURCE		
33.	<b>0.14%</b> <a href="https://journal.yrpipku.com">journal.yrpipku.com</a>	●
	<a href="https://journal.yrpipku.com/index.php/ceej/article/download/7442/4040/38901">https://journal.yrpipku.com/index.php/ceej/article/download/7442/4040/38901</a>	
INTERNET SOURCE		
34.	<b>0.13%</b> <a href="http://eprint.stieww.ac.id">eprint.stieww.ac.id</a>	●
	<a href="http://eprint.stieww.ac.id/2407/1/Artikel%20JRABI_Khoirunnisa.pdf">http://eprint.stieww.ac.id/2407/1/Artikel%20JRABI_Khoirunnisa.pdf</a>	
INTERNET SOURCE		
35.	<b>0.13%</b> <a href="https://journal.stieamkop.ac.id">journal.stieamkop.ac.id</a>	●
	<a href="https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/download/7387/5196">https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/download/7387/5196</a>	
INTERNET SOURCE		
36.	<b>0.13%</b> <a href="https://ojs.unpkediri.ac.id">ojs.unpkediri.ac.id</a>	●
	<a href="https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/16815/2713/3...">https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/16815/2713/3...</a>	
INTERNET SOURCE		
37.	<b>0.12%</b> <a href="https://ejournal.unib.ac.id">ejournal.unib.ac.id</a>	●
	<a href="https://ejournal.unib.ac.id/fairness/article/download/15180/7385/39033">https://ejournal.unib.ac.id/fairness/article/download/15180/7385/39033</a>	
INTERNET SOURCE		
38.	<b>0.12%</b> <a href="https://repository.unib.ac.id">repository.unib.ac.id</a>	●
	<a href="https://repository.unib.ac.id/id/eprint/20500/">https://repository.unib.ac.id/id/eprint/20500/</a>	
INTERNET SOURCE		
39.	<b>0.12%</b> <a href="https://ejournal.nusantaraglobal.or.id">ejournal.nusantaraglobal.or.id</a>	●
	<a href="https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/download/3184/...">https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/download/3184/...</a>	
INTERNET SOURCE		
40.	<b>0.11%</b> <a href="http://repository.mediapenerbitindonesia.com">repository.mediapenerbitindonesia.com</a>	●
	<a href="http://repository.mediapenerbitindonesia.com/327/1/K%20185%20-%20Metode..">http://repository.mediapenerbitindonesia.com/327/1/K%20185%20-%20Metode..</a>	
INTERNET SOURCE		
41.	<b>0.11%</b> <a href="https://journal.umy.ac.id">journal.umy.ac.id</a>	●
	<a href="https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/download/7686/4784">https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/download/7686/4784</a>	
INTERNET SOURCE		
42.	<b>0.1%</b> <a href="https://www.academia.edu">www.academia.edu</a>	●
	<a href="https://www.academia.edu/95123592/Pengaruh_Karakteristik_Individu_Dan_Le..">https://www.academia.edu/95123592/Pengaruh_Karakteristik_Individu_Dan_Le..</a>	



REPORT #27612971

INTERNET SOURCE		
43.	0.09% owner.polgan.ac.id <a href="https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/707/324/3186">https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/707/324/3186</a>	●
INTERNET SOURCE		
44.	0.09% repository.iainpare.ac.id <a href="http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2479/4/16.2300.040%20BAB%203.pdf">http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2479/4/16.2300.040%20BAB%203.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
45.	0.09% jurnal.intekom.id <a href="https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/download/125/101/557">https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/download/125/101/557</a>	●
INTERNET SOURCE		
46.	0.09% eprints.walisongo.ac.id <a href="https://eprints.walisongo.ac.id/20775/1/1805046036_Elsa%20Rahma_Lengkap%..">https://eprints.walisongo.ac.id/20775/1/1805046036_Elsa%20Rahma_Lengkap%..</a>	●
INTERNET SOURCE		
47.	0.09% ejournal.unitomo.ac.id <a href="https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/download/8558/4071/">https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/download/8558/4071/</a>	●
INTERNET SOURCE		
48.	0.08% ejournal3.undip.ac.id <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/47870/32...">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/47870/32...</a>	●
INTERNET SOURCE		
49.	0.07% www.ojs.pseb.or.id <a href="https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/download/1379/980/3670">https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/download/1379/980/3670</a>	●
INTERNET SOURCE		
50.	0.04% repository.stie-mce.ac.id <a href="http://repository.stie-mce.ac.id/2099/3/BAB%202%20Tinjauan%20Pustaka.pdf">http://repository.stie-mce.ac.id/2099/3/BAB%202%20Tinjauan%20Pustaka.pdf</a>	●
INTERNET SOURCE		
51.	0.04% repository.uinjkt.ac.id <a href="https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70256/1/235.%2011...">https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70256/1/235.%2011...</a>	●
INTERNET SOURCE		
52.	0.02% repository.ekuitas.ac.id <a href="http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/64/BAB%202.pdf?s...">http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/64/BAB%202.pdf?s...</a>	●



REPORT #27612971

● QUOTES

INTERNET SOURCE

1. **0.28%** conference.upnvj.ac.id

<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/viewFile/1702/1170>